

**STRATEGI DAN DAMPAK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS MINAPOLITAN
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

AKBAR KHAMARULLAH

105030100111038



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2014

Pemenang dan pecundang hanya dibedakan berdasarkan tindakan, pecundang selalu mencari alasan dan pemenang selalu mencari solusi.

Mario teguh



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)

Disusun Oleh : Akbar Khamarullah

Nim : 105030100111038

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

Malang, 28 April 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Prof. Dr. A Juli Andi Gani, MS
19540704 198103 1 003



Dr. Riyanto, M.Hum
19600430 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 20 Mei 2014
 Jam : 11.00 WIB
 Skripsi atas nama : Akbar Khamarullah
 Judul :“STRATEGI DAN DAMPAK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS MINAPOLITAN (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)”.

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

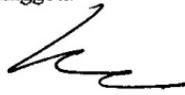
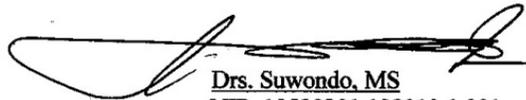



Prof. Dr. A Juli Andi Gani, MS
 19540704 198103 1 003

Dr. Riyanto, M.Hum
 19600430 198601 1 001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Sumartono, MS
 NIP. 19540916 198212 1 001

Drs. Suwondo, MS
 NIP. 19530201 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

Malang, 30 April 2014



AKbar Khamarullah
105030100111038

RINGKASAN

Akbar Khamarullah, 2014, **Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)**, Prof. A. Juli Andi Gani, MS, Dr. Riyanto, M.Hum

Minapolitan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi-potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang budidaya perikanan. Namun, UMKM masih menemui berbagai macam hambatan seperti rendahnya kapasitas SDM, terbatasnya modal, serta sulitnya aspek pemasaran yang dapat memperlambat perkembangannya. Maka dari itu dibutuhkan peranan pemerintah dalam menyusun strategi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan.

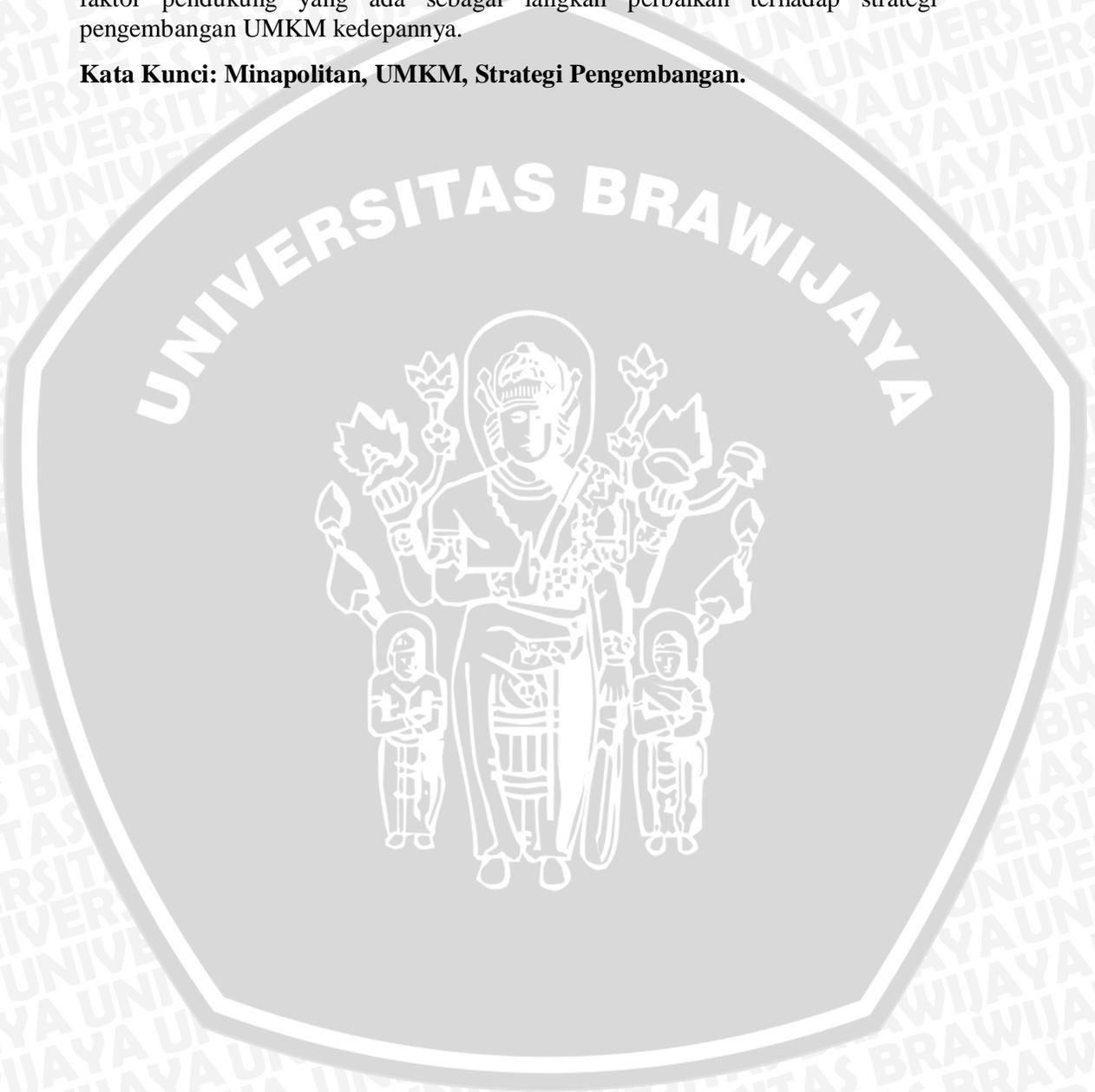
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan UMKM di bidang budidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari pengembangan tersebut bagi masyarakat, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung strategi yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai langkah perbaikan strategi pengembangan ke depannya dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Fokus dalam Penelitian ini 1) strategi pengembangan umkm berbasis minapolitan meliputi : a) pemberdayaan sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan serta pembinaan dan pelatihan b) bantuan permodalan usaha c) pengembangan balai benih ikan, 2) dampak pengembangan UMKM bagi masyarakat yang meliputi: a) meningkatnya kesejahteraan ekonomi pembudidaya b) meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, 3) faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi : a) faktor penghambat dan b) faktor pendukung. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Muncar yang merupakan daerah pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) strategi pengembangan yang ada masih belum berjalan secara optimal khususnya pada strategi pemberdayaan sumber daya manusia yang saat ini masih terkendala pada minimnya intensitas pembinaan dan pelatihan yang diberikan, 2) masih sulitnya pelaku usaha budidaya dalam mengakses sumber permodalan produktif pada lembaga perbankan. Namun, UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar masih dapat terus dikembangkan jika melihat pada faktor-faktor pendukung yang ada seperti masih tersedianya lahan potensial bagi usaha budidaya perikanan, adanya kemitraan dengan pihak swasta, serta masih adanya peluang untuk melakukan diversifikasi usaha yang mampu meningkatkan nilai jual produk. Adapun dampak dari pelaksanaan strategi pengembangan UMKM yang telah dilakukan diantaranya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi akibat

meningkatnya hasil produksi yang juga berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya, serta berdampak pada sosial ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan usaha budidaya perikanan utamanya dalam menumbuhkan wirausahawan baru dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, maka Dinas kelautan dan perikanan diharapkan mampu mengevaluasi strategi yang ada dengan mereduksi faktor penghambat yang dihadapi dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada sebagai langkah perbaikan terhadap strategi pengembangan UMKM kedepannya.

Kata Kunci: Minapolitan, UMKM, Strategi Pengembangan.



Akbar Khamarullah, 2014, **Strategy and Impact of Development Micro, Small, and Medium Enterprises Based Minapolitan (Studies in the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi Regency)**, Prof. A. Juli Andi Gani, MS, Dr. Riyanto, M.Hum

Minapolitan is intended to optimize the potential of marine and fisheries which can be contributor to regional economic development in order to improve the welfare of society equally, especially through micro, small, and medium enterprises (UMKM) of aquaculture. However, UMKM is still encounter various obstacles such as lack of human resource capacity, limited capital, and difficult aspects of marketing which can be sluggish its development. Thus, it is needed the development's role turn the expansion strategy based on Minapolitan.

This study aims to describe and analyze the development strategic UMKM of aquaculture which carried out by the Department of Marine and Fisheries and Banyuwangi regency thus describe and analyze the impact of the development for community, and to analyze the factors that a barrier or support the existing strategies. This research is expected to be input to the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi district as corrective measures and future development strategy can be a reference for other researchers who will conduct research on the same topic.

This method used descriptive qualitative study using data analysis Miles and Huberman. The focus in this study was 1) minapolitan based SME development strategy include: a) the empowerment of human resources through institutional strengthening as well as coaching and training b) venture capital fund c) the development of fish breeding centers, 2) the impact of the development of SMEs for the community which include: a) increasing the economic welfare of farmers, b) increasing socioeconomic, 3) the factors that influence include: a) inhibiting factor and b) supporting factors. Location of research in this study was the Department of Marine and Fisheries Banyuwangi and District of Muncar which is an area of regional development Minapolitan in Banyuwangi.

This research resulted in several conclusions: 1) the development strategy is still not running optimally, on human resource empowerment strategy that is still constrained to the lack of intensity of coaching and training provided, 2) the difficulty of cultivating entrepreneurs in accessing capital sources productive banking institution. However, the UMKM aquaculture at Muncar district is still be able to developed based on the factors such as there is an availability potential land for aqua culture, the existence of a partnership with the private sector, and there is still the opportunity for diversification of business, which can increase production, also it affects the farmer's income, as well as the socio-economic impact on communities around the aquaculture environment primarily in growing new entrepreneurial and employment. Therefore, the Department of Marine and Fisheries is expected to evaluate existing strategies by reducing the barriers

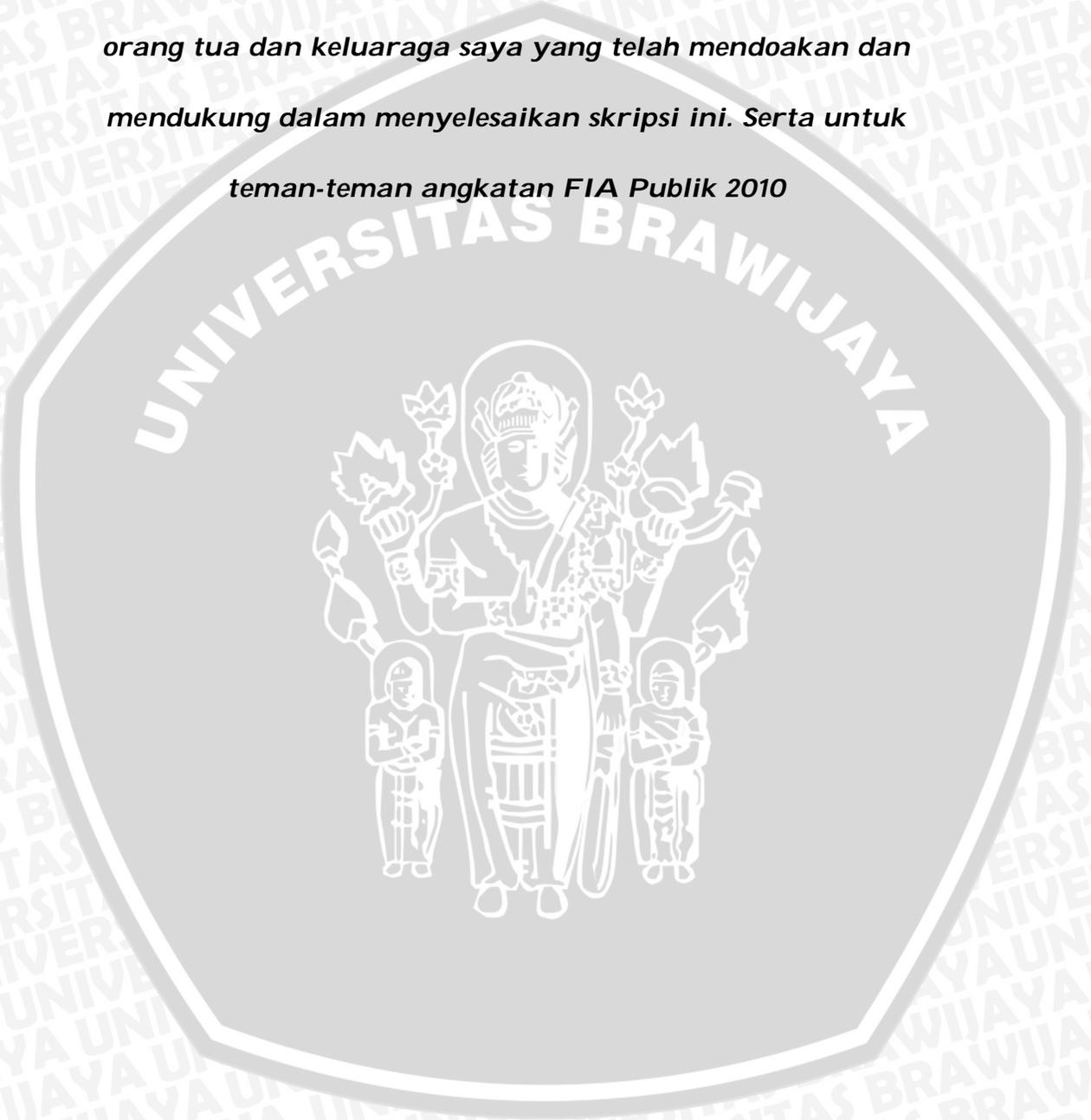
factors and optimize the supporting factors as the measure to enhance the development strategy of UMKM in the future.

Keywords: Minapolitan, UMKM, Development Strategy



PERSEMBAHAN

Hasil karya Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang telah mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk teman-teman angkatan FIA Publik 2010



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Minapolitan (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indahmindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Prof. Dr. A. Juli Andi Gani, MS dan Dr. Riyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk bimbingan dan petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ir. Pudjo Hartanto M.Ap selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga terima kasih atas doa yang selalu mengalir, tuntunan, dukungan, serta usahanya yang diberikan.
7. Mayta Secandina Putri yang selalu mendukung selama ini serta teman-teman yang selalu ada untuk saya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 29 April 2014

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Pemberdayaan.....	13
1. Tujuan Pemberdayaan	15
2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan	15
3. Strategi Utama Pemberdayaan	17
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	19
1. Definisi UMKM	19
2. Karakteristik UMKM	20
3. Peran UMKM Bagi Perekonomian.....	22
4. Permasalahan dan Hambatan UMKM	23
C. Strategi.....	24
1. Syarat-syarat Strategi	25
2. Manfaat Strategi	26
D. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	27
1. Aktor Dalam Pengembangan UMKM	28

2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM.....	28
3. Dampak Pengembangan UMKM	32
E. Pembangunan Kawasan Perikanan dan Kelautan	33
1. Revolusi Biru	34
2. Minapolitan	35
a. Konsep Minapolitan	36
b. Sasaran dan Tujuan Minapolitan	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi dan Situs Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Gambaran Umum Kecamatan Muncar.....	49
a. Letak Administratif	50
b. Pemanfaatan Lahan	51
c. Tenaga Kerja	52
d. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Muncar	53
2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	59
a. Tugas Pokok.....	59
b. Visi, Misi, dan Tujuan	60
c. Susunan Organisasi	63
d. Komposisi dan Jumlah Pegawai	65
e. Rencana Strategis.....	66
B. Hasil Penelitian	69
1. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Minapolitan.....	69
a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	71
1. Pembentukan KUB	71
2. Pembinaan dan Pelatihan	74
b. Bantuan Permodalan Usaha	80
c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	88

2. Dampak Pengembangan UMKM Bagi Perekonomian Masyarakat	90
a. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Pembudidaya	92
b. Meningkatnya Sosial Ekonomi Masyarakat.....	96
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	99
a. Faktor Penghambat	99
b. Faktor Pendukung.....	104
C. Pembahasan.....	107
1. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Minapolitan.....	107
a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	109
1. Pembentukan KUB	109
2. Pembinaan dan Pelatihan	111
b. Bantuan Permodalan Usaha	114
c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	118
2. Dampak Pengembangan UMKM Bagi Perekonomian Masyarakat	119
a. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Pembudidaya	119
b. Meningkatnya Sosial Ekonomi Masyarakat.....	125
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	128
c. Faktor Penghambat	128
d. Faktor Pendukung.....	133
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Muncar Tahun 2008-2011	4
Tabel 2	Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Muncar Berdasarkan Jenis Lahan.....	51
Tabel 3	Banyaknya Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011.....	53
Tabel 4	Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Muncar Tahun 2002-2010.....	54
Tabel 5	Luas Tambak di Desa/ Kelurahan Kecamatan Muncar.....	55
Tabel 6	Banyaknya Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Muncar .	56
Tabel 7	Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi	62
Tabel 8	Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Melalui Kebijakan	66
Tabel 9	Pembinaan POKDAKAN di Kecamatan Muncar Tahun 2013	79
Tabel 10	Perkembangan Hasil Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2008-2012	85
Tabel 11	Jumlah Bantuan Kolam Kecamatan Muncar Tahun 2013.....	86
Tabel 12	Potensi Tambak Kabupaten Banyuwangi.....	88
Tabel 13	Produksi Budidaya Air Tawar Di Kecamatan Muncar Tahun 2012-2013.....	93
Tabel 14	Produksi Budidaya Air Payau Di Kecamatan Muncar Tahun 2012- 2013.....	95

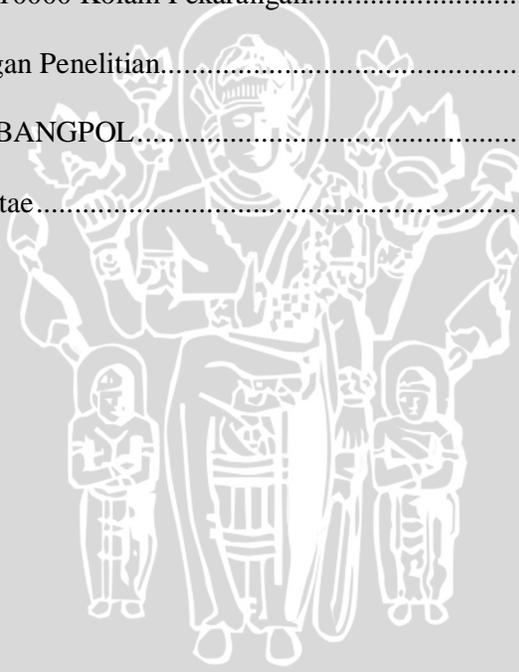
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan UMKM Budidaya Perikanan di Kecamatan Muncar....	6
Gambar 2	Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	47
Gambar 3	Rencana Zonasi Minapolitan Kecamatan Muncar	57
Gambar 4	Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi	64
Gambar 5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	65
Gambar 6	Alur Pengajuan Paket Bantuan Modal Usaha	83
Gambar 7	Perkembangan UMKM di Kecamatan Muncar Tahun 2010-2013	98



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	
1.	Panduan Wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan.....	146
2.	Panduan Wawancara Pelaku Usaha Budidaya.....	147
3.	Foto Pembinaan dan Pelatihan.....	148
4.	Foto Program Revitalisasi Tambak.....	148
5.	Foto Program 10000 Kolam Pekarangan.....	148
6.	Surat Keterangan Penelitian.....	149
7.	Surat BAKESBANGPOL.....	150
8.	Curriculum Vitae.....	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir dari diadakannya pembangunan ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya di negara berkembang seperti Indonesia biasanya diukur dari pembangunan ekonominya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti sistem pemerintahan yang ada.

Sebelum era reformasi arah kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia cenderung bersifat sentralistik dengan pemerintah pusat sebagai poros utama penyelenggara pembangunan. Namun saat ini, dengan terciptanya UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Diterapkannya otonomi daerah ini mampu mendorong keinginan daerah untuk mengembangkan perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam UU No.32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap

daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik sosial, budaya, bahkan geografisnya sehingga perlu menerapkan kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya untuk mencapai hasil pembangunan ekonomi yang optimal dan nantiya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah pesisir merupakan salah satu ruang yang banyak memiliki potensi untuk dikembangkan bagi perekonomian daerah khususnya bagi daerah dengan kondisi geografis yang menunjang. Wilayah pesisir begitu banyak menyimpan potensi sumber daya alam didalamnya, selain itu juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik bagi berbagai kegiatan ekonomi baik dari segi transportasi, industri, pemukiman, serta pariwisata. Dalam rangka mengoptimalkan potensi pesisir tersebut pemerintah menerapkan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan. Nugroho dan Dahuri (2012:285) menjelaskan bahwa “Minapolitan berasal dari kata mina berarti ikan, dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan”.

Penerapan Minapolitan bertujuan guna percepatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan dengan pendekatan cepat tumbuh layaknya sebuah kota. Pelaksanaan konsep Minapolitan sendiri utamanya dikhususkan bagi daerah pedesaan yang pada umumnya lambat dalam perkembangannya, karena berbagai macam faktor seperti: kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan

dengan daerah perkotaan. Salah satu daerah yang menjadi *Pilot Project* pengembangan kawasan Minapolitan di Indonesia adalah Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sekitar 5.782,50 km dengan panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 10 buah. Dengan kondisi geografis yang menunjang tersebut menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah penghasil produk perikanan terbesar di Indonesia, hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan bapak Cicip Syarif Rahardjo dalam safari ramadhan di Pendopo Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2012 produksi perikanan Kabupaten Banyuwangi mencapai 66.000 ton yang terdiri dari 44.000 ton perikanan tangkap dan 22.000 ton perikanan budidaya (Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Banyuwangi,2012). Kecamatan Muncar merupakan pusat penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya serta sentra pengolahan hasil perikanan. Pada tahun 2009 Kecamatan Muncar ditunjuk sebagai daerah inti pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi.

Pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Muncar telah dilakukan pada tahun 2010 dengan memfokuskan pada pengoptimalan perikanan tangkap, yang saat ini hanya sebatas pada pembangunan fisik seperti pembangunan tanggul pemecah ombak serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (www.setgab.go.id). Selain itu pembangunan juga dilakukan dengan memperluas dan memperbaiki sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) guna mengoptimalkan jumlah

pendaratan perikanan tangkap dengan komoditas utama lemuru. Namun, pengembangan kawasan Minapolitan ini, tidak serta merta mampu mengangkat perekonomian masyarakat Muncar yang sebagian bekerja pada sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

Tabel 1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Muncar Tahun 2008 - 2011

No.	Klasifikasi	2008	2011
1	Sangat Miskin	1,971	2,888
2	Miskin	3,069	3,931
3	Hampir Miskin	2,669	3,544
TOTAL		7,709	10,363

Sumber: (Hasil PPLS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi)

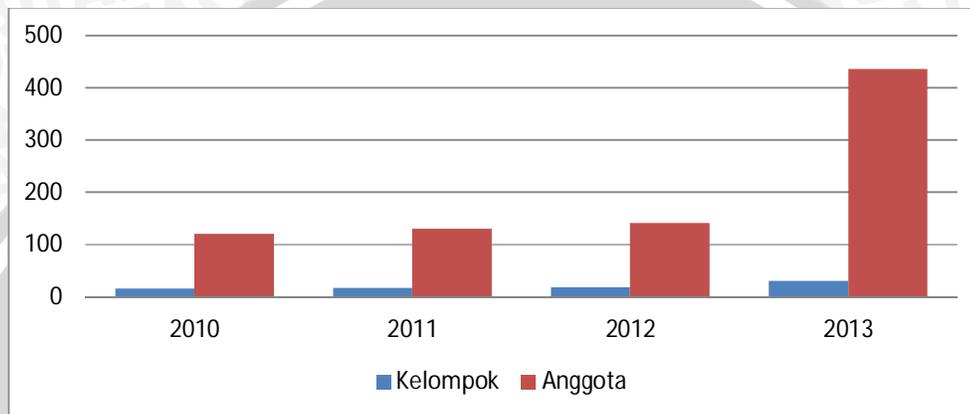
Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin semakin bertambah bahkan setelah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan. Salah satu yang menjadi indikasi semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Muncar akibat menurunnya jumlah hasil perikanan tangkap khususnya komoditas lemuru. Hal ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wingking (2013:114) tentang implikasi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir atas turunnya hasil tangkapan lemuru (studi kasus masyarakat pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi), yang menyatakan menurunnya hasil tangkapan lemuru berdampak pada penurunan perekonomian masyarakat utamanya yang berprofesi sebagai nelayan dan pengolah hasil perikanan. Pada tahun 2009 jumlah ikan lemuru yang berhasil didaratkan sebesar

28.446 ton, Tahun 2010 sebesar 17.717 ton, dan terus mengalami penurunan drastis hingga tahun 2011 hanya 1.651 ton saja (Muncar dalam angka 2012).

Winking (2013) menyatakan bahwa menurunnya hasil tangkapan lemuru tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya ikan pada tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya *over fishing*. Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mencoba mengembangkan alternatif lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Muncar melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan.

Pemilihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri, didasari pada peranan sektor ini dalam mendinamisasi perekonomian secara makro maupun mikro. Pada tahun 2010 jumlah UMKM yang tercatat sebanyak 52,7 juta atau 99,90% dari total jumlah jenis usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,8 juta jiwa atau 97,28% dari total angkatan kerja yang ada (www.depkop.go.id). Peranan penting lainnya sektor UMKM diantaranya: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Kuncoro, 2002). Berdasarkan peranan itulah maka sangat penting sekali untuk mengembangkan UMKM khususnya di bidang budidaya perikanan. Pengembangan UMKM tersebut juga ditujukan agar pembangunan kawasan Minapolitan sesuai dengan azas

demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat yang tersirat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per.12/men/2010 tentang Minapolitan.



Gambar 1 Perkembangan UMKM Budidaya Perikanan Kecamatan Muncar

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2013 mencapai 436 Unit usaha yang tergabung dalam 30 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan jumlah tersebut masih dapat terus bertambah jika dikembangkan. Pada Kecamatan Muncar saat ini terdapat dua komoditas unggulan UMKM budidaya perikanan, yaitu budidaya air payau dengan komoditas utama udang vename dan budidaya air tawar dengan komoditas lele yang juga merupakan komoditas utama budidaya air tawar di Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar masih didominasi oleh usaha skala mikro, yang umumnya memiliki berbagai kesulitan dalam mengembangkan usahanya. dalam pengamatan awal yang

dilakukan oleh peneliti permasalahan atau kendala yang sering dihadapi antara lain:

1. Mainset Pembudidaya

Cara pandang/ *mainset* pembudidaya yang masih menganggap usaha budidaya sebagai usaha sampingan sehingga pengelolaannya belum dilakukan secara penuh dan profesional.

2. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Usaha budidaya umumnya tumbuh secara traditional yang kebanyakan dikelola secara kekeluargaan dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan SDM lebih kepada rendahnya pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya juga berpengaruh pada management pengelolaan usaha, yang membuat usaha budidaya perikanan sulit berkembang dan bersaing.

3. Lemahnya aspek permodalan

Permodalan merupakan faktor utama untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dalam usaha budidaya perikanan dikarenakan usaha ini umumnya usaha milik perorangan yang memiliki modal terbatas (wawancara bapak Suryono, Kabid Perikanan Budidaya tanggal 5 Desember 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mampu mereduksi hambatan-hambatan yang ada agar UMKM budidaya perikanan dapat berkembang, khususnya melalui peranan aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Dalam PERBUB No. 53 Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas untuk melakukan pengembangan terhadap usaha budidaya perikanan antara lain: 1) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya, 2) perencanaan pengembangan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang perikanan budidaya, 3) melaksanakan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu strategi-strategi pengembangan UMKM dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Marrus (2002:31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut., disini strategi erat kaitannya dengan tujuan, sarana dan cara mengembangkan UMKM.

Dengan adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri sehingga mampu mempercepat tercapainya tujuan kawasan Minapolitan, serta dapat menjadi sebuah langkah konservasi dengan mengurangi intensitas penangkapan ikan dilautan. Selain itu berkembangnya UMKM ini nantinya juga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum serta diharapkan mampu menjadi contoh guna menarik minat masyarakat

untuk memulai usaha budidaya perikanan sehingga menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru dibidang budidaya perikanan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menetapkan penelitian dengan judul
“STRATEGI DAN DAMPAK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS MINAPOLITAN (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi).

B. Rumusan Masalah

Bardasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Strategi apa saja yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan UMKM berbasis Minapolitan?
2. Bagaimana dampak pengembangan UMKM berbasis Minapolitan bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Muncar?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan UMKM berbasis Minapolitan?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak diterapkannya strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap masyarakat di Kecamatan Muncar.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan pelaku usaha dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian lain mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian terdahulu dan menjadi referensi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan serta mencari solusi pemecahan masalah-masalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis Minapolitan.

- b. Bagi peneliti sendiri, sengan sarana atau wahana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang yang menyajikan potensi kelautan dan perikanan untuk pembangunan perekonomian di Kecamatan Muncar melalui konsep Minapolitan khususnya melalui budidaya perikanan, namun dalam pelaksanaannya usaha budidaya perikanan mengalami berbagai hambatan sehingga membutuhkan upaya pengembangan dari pemerintah. Pada bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang kerangka teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

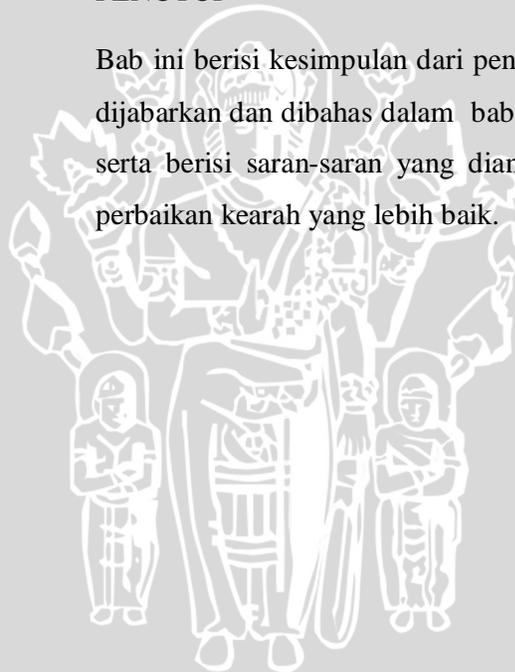
Bab ini memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV**HASIL PENELITIAN**

isi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Kecamatan Muncar, gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, strategi pengembangan, dampak dari pengembangan UMKM bagi masyarakat serta pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan tersebut.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dijabarkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu guna perbaikan kearah yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat ditinjau dari perspektif pembangunan berdasarkan indikator kesejahteraan yang ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Maka dengan asumsi-asumsi pembangunan yang ada yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (*efficient*) untuk dapat memenuhinya.

Suharto (2005:58) menyatakan beberapa definisi pemberdayaan menurut beberapa ahli yang dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan diantaranya:

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995)
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana seseorang menjadi menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson, et. Al, 1994).
- c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rapport, 1984).

Sedangkan menurut Suhendra (2006:75) mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan

ekonomi yang didasari pada nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma yang menekankan pada partisipasi masyarakat serta fokus pada pembangunan manusia. Pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat berdaya (mempunyai kemampuan) meliputi aspek fisik dan material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual (meningkatkan sumberdaya manusia).

Pemberdayaan sendiri berasal dari kata *emporment* atau *empower* yang menurut Webster (dalam Sedarmayanti, 2003:59) mengandung arti:

“Pertama, *to give power or authority*, serta arti kedua berarti *to give ability to or enable*. Dimana pengertian pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua mengandung makna sebagai upaya memberi kemampuan atau memberdayakan”.

Dari definisi-definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan agar mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Maka sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan

diri, mampu menyampaikan aspirasi, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

1. Tujuan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan yang dilakukan pada awalnya dihadapkan pada ketidakmampuan karena kondisi masyarakat yang lemah. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan ialah untuk membentuk individu atau masyarakat mandiri yang meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka ingin lakukan. Kemandirian masyarakat diartikan sebagai kondisi yang dialami oleh masyarakat dengan ditandai kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi tercapainya pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan sendiri yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004:82) “pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi”. Dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa pemberdayaan harus melalui suatu proses belajar maka akan ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap tersebut meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap pertama ini atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya, aktor, maupun pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan secara efektif. Sentuhan penyadaran diharapkan dapat membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini. Dengan demikian dapat mendorong kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi kearah yang lebih baik.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Pada tahap kedua, kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama terlaksana dengan baik. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Kesadaran ini akan mendorong terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan dan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahapan ini menjadi masyarakat hanya menjadi objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk

mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004:83). Tahap ketiga adalah tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Pada tahapan ini masyarakat akan mampu secara mandiri melakukan pembangunan-pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini masyarakat didudukan pada posisi sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

3. Strategi utama pemberdayaan

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Strategi pemberdayaan begitu dirasa sangat penting guna mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri. Tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan link dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam konteks pekerjaan sosial, parson dalam (Suharto, 2005:66) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan (*empower setting*): mikro, mezzo, dan makro yang menjelaskan antara lain:

a) Aras mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b) Aras mezzo

Pemberdayaan yang dilakukan pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

c) Aras makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dengan berpedoman pada strategi utama tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan akhirnya pun dapat tercapai. Untuk itu penting sekali, suatu proses pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik jika diawali dengan penciptaan pemikiran-pemikiran ataupun konsep-konsep tentang strategi-strategi pemberdayaan itu sendiri. Karena tidak terpungkiri juga apabila suatu kegiatan berjalan tanpa dilandasi oleh strategi-strategi yang matang maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Untuk itu penerapan strategi yang tepat terhadap pemberdayaan UMKM berbasis minapolitan di Kabupaten Banyuwangi sangat diharapkan guna tercapainya tujuan dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini perbaikan taraf hidup masyarakat.

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Definisi UMKM

Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM) yang didalamnya juga mencakup usaha mikro tidak selalu sama, tergantung pada konsep yang digunakan. Sedikitnya terdapat dua aspek dalam konsep UKM, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki banyak pengertian sebelum dikeluarkannya UU no. 9 tahun 1995 tentang UMKM yang kemudian digantikan dengan UU No.20 tahun 2008, pengertian UMKM yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Merupakan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek permodalan dan aspek sumber daya manusia. Permodalan dan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting yang dapat mendorong perkembangan usaha kecil menengah.

a. Aspek Permodalan UMKM

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM adalah ketersediaan permodalan yang terbatas. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang. Cahyono dikutip oleh Tejasari (2008: 18) mengatakan bahwa modal dalam bentuk uang digunakan oleh sektor produksi untuk membeli modal dalam bentuk barang baru lagi. Salah satu bentuk permodalan adalah bentuk permodalan kredit.

Kredit mempunyai peranan sangat penting dalam memacu perkembangan usaha, terutama dalam pembentukan modal (*capital formation*). Kredit juga sangat penting untuk meningkatkan likuiditas usaha walaupun dapat menimbulkan resiko

apabila usaha itu gagal memberikan penerimaan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, Bank Indonesia (1999) dikutip oleh Tejasari (2008: 18) membedakan kredit menjadi :

- 1) Kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang diberikan misalnya untuk membeli kendaraan, peralatan, dan lain-lain yang sifatnya untuk tujuan konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi dan dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- 2) Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja untuk membiayai seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, biaya pemasaran dan lain-lain dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 3) Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru.

b. Aspek Sumber Daya Manusia UMKM

UMKM merupakan usaha yang masuk dalam kategori usaha informal. Sektor informal menurut Cahyono (1983) dikutip oleh Tejasari (2008:19) memiliki karakteristik, sebagai berikut: 1) kegiatan usaha umumnya sederhana; 2) skala usaha relatif kecil; 3) usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha;

4) tingkat penghasilan sektor informal umumnya rendah jika dibandingkan sektor formal.

Tenaga kerja sektor informal memiliki karakteristik tertentu antara lain: 1) tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar; 2) tidak memiliki ketrampilan yang memadai; 3) biasanya tidak atau memiliki sedikit pendidikan formal; 4) biasanya tenaga kerja dirangkap produsen dengan dibantu tenaga kerja keluarga.

3. Peran UMKM Bagi Perekonomian

UMKM mempunyai banyak peran penting dalam perekonomian. Salah satu peran UMKM yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.

Selain itu menurut Kuncoro (2002) dikutip oleh Tejasari (2008: 22) mengatakan bahwa peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor; (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Oleh karenanya peran usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Selain itu Liana (2008:

104) Mempertimbangkan bahwa UK pada umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan kandungan impornya rendah, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan UK diyakini akan memperkuat fondasi struktur perekonomian nasional.

Pengembangan UMKM secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pengembangan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal (Gie Kian, K, 2003).

4. Permasalahan dan Hambatan UKM

Pada umumnya semua jenis usaha mengalami berbagai permasalahan yang menghambat usaha tersebut begitu juga dengan UKM. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah antara lain meliputi: (Jafar Hafisah, 2004).

(a)Faktor Internal

1) Kurangnya permodalan;

Permodalan merupakan faktor utama untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dalam UKM dikarenakan usaha ini umumnya usaha milik perorangan yang memiliki modal terbatas.

2) Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas;

Umumnya UKM tumbuh secara traditional yang dikelola secara kekeluargaan. Keterbatasan SDM lebih kepada rendahnya pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya juga berpengaruh pada management pengelolaan usaha, yang membuat usaha sulit berkembang.

3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar;

Usaha kecil dan menengah mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dengan kemampuan penetrasi pasar yang rendah.

(b)Faktor Eksternal

1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif;

Masih banyak terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2) Terbatasnya saran dan prasarana;

Kurangnya informassi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meyebabkan saran dan prasarana yang dimiliki UKM juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung untuk kemajuan usaha.

C. Strategi

Strategi umumnya erat kaitannya dengan istilah yang digunakan dalam peperangan, ini dikarenakan peperangan sering menggunakan *term* atau istilah

strategi yang diartikan sebagai suatu cara dalam memenangkan peperangan. Strategi dalam perkembangannya saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan militer saja, namun telah mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas. Pengertian strategi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli yang intinya menyatakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Marrus (2002:31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau uoaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi lain strategi menurut Marbun (2003:341) adalah sebuah rencana yang cermat mengenai kegiatan guna mencapai sasaran tertentu yang berkaitan dengan waktu serta ukuran. Dari definisi-definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara berupa tindakan melalui pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

1. Syarat-Syarat Strategi

Orientasi strategi bertumpu pada implikasinya dalam kehidupan sehari-hari agar penyusunan strategi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Menurut Siagian (2002:102-103) dalam merumuskan strategi ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi. Strategi yang dirumuskan harus menuju disatu pihak.

- b. Strategi harus mampu memperhitungkan secara *realistic* kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana yang diperlukan untuk menjalankan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan dilaksanakan secara teliti. Tolak ukur efektif tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya namun mencakup juga pada pelaksanaannya.

2. Manfaat Strategi

Strategi umumnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan secara ilmiah. Strategi ditetapkan oleh organisasi sebagai keberlanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rangkaian kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Siagian (2002:206-209) secara implisit mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara kongkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang tertentu berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interpendensi, dan interrelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan hal yang ditetapkan.

D. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Moekijat dalam Wijayanti (2002:32) pengembangan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun akan datang dengan mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Sementara, definisi lain pengembangan menurut Pamudji (1985: 7) adalah:

“Suatu pengembangan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan bermanfaat”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan, memperbaiki, meningkatkan sesuatu yang sudah ada secara teratur dan bertahap agar menjadi lebih baik. Adapun pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Kartasasmita (1996:5) harus meliputi aspek-aspek, diantaranya:

- a. Peningkatan akses kepada asset produktif, terutama modal, di samping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- b. Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan, prasarana mendasar akan sangat membantu adalah sarana perhubungan.
- c. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
- d. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar sangatlah penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*).
- e. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

1. Aktor Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sebagai salah satu bentuk kebijakan nasional pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan perekonomian secara makro maupun mikro yang merata. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah-langkah pengembangan dalam rangka membantu UMKM mengatasi kesulitan-kusulitan yang dihadapinya. Berdasarkan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang berperan sebagai pengembang UMKM adalah:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
 - a. Produksi dan pengolahan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Sumber daya manusia; serta
 - d. Desain dan teknologi
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM

Dalam sebuah proses pengembangan dalam hal ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), langkah awal yang perlu dilakukan ialah mengidentifikasi permasalahan, agar dapat menetapkan strategi yang tepat dalam proses pengembangannya. Strategi dalam pengembangan ini berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM, antara lain:

1) Government Provision

Government provision pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk peranan pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pungutan kepada individu-individu yang menikmatinya. Guna mengimplementasikan perannya sebagai *government provision* dalam pengembangan UMKM, pertama pemerintah daerah perlu melakukan kajian kembali pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dengan memberikan pelatihan dan keterampilan guna menunjang bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi tersebut. Kedua pemerintah daerah harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan penguasaan teknologi bagi UMKM, seperti penggunaan teknologi tepat guna dan teknologi digital. Hal tersebut, perlu dilakukan dalam rangka menghadapi perekonomian pada era globalisasi dimana pelaku pasar tidak lagi hanya berorientasi pada pasar domestik tetapi pasar internasional. Ketiga, pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan manajemen dan organisasi pada UMKM yang saat ini masih bersifat traditional agar pelaku usaha kecil mampu mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan berupa permodalan.

2) Subsidi

Subsidi merupakan bentuk keterlibatan pemerintah secara tidak langsung yang berupa pada dasarnya berupa bantuan dana secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengimplementasiannya, pertama pemerintah harus mampu bersikap adil dan bijak dalam memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang nantinya digunakan untuk mengembangkan usahanya. Namun,

dalam mengaktualisasikan peranan tersebut pemerintah sering kali salah sasaran sehingga usaha kecil yang harusnya dibantu justru tidak terbantu. Bantuan yang diberikan tidak hanya berbentuk modal, tetapi juga dalam bentuk peralatan penunjang usaha. Kedua, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil agar memiliki akses permodalan dari lembaga perbankan daerah agar mampu mengembangkan usahanya.

3) Regulasi

Regulasi merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung berupa pembuatan kebijakan. Untuk merealisasikannya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung terjadinya persaingan sehat, sebab tanpa adanya persaingan sehat posisi jual usaha kecil tidak akan mampu bersaing dengan usaha yang berskala besar yang nantinya berdampak pada eksistensi UMKM dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Kedua, pemerintah harus menetapkan kebijakan pengurangan beban ekonomi biaya tinggi. Ini dapat direalisasikan dengan pembentukan kantor pelayanan pelayanan terpadu dimana segala pelayanan yang berhubungan dengan usaha kecil baik itu perizinan dan lain sebagainya cukup dilakukan dalam satu tempat.

4) Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah memiliki peranan untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan didaerahnya. Dalam peranannya sebagai koordinator, juga dapat melibatkan lembaga lainnya, dunia usaha, masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi. Dalam merealisasikan strategi tersebut dapat

dilakukan dengan pembentukan asosiasi pengusaha ataupun himpunan kelompok usaha.

Selain itu strategi lain yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha kecil menurut Hetifah Sjaifudin (1995: 66-75) adalah:

a. Peningkatan kemampuan finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi pelaku usaha kecil menunjukkan komitmen dari pemerintah, upaya pemerintah tersebut direalisasikan melalui pemberian modal sementara untuk membantu pengembangan usaha kecil.

b. Pengembangan pemasaran

Pada era globasi ini yang menganut sistem pasar bebas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal tersebut merupakan peluang sekaligus ancaman bagi UMKM. Maka dari itu terdapat tiga strategi dalam pengembangan pemasaran, yaitu:

1. Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar

Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pola hubungan produksi subkontrak yang diprioritaskan dilakukan secara vertikal. Penerapan pola ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi.

2. Proteksi pasar

Bentuk proteksi dalam hal ini melalui komsumsi sekitar 10% dari total anggaran pemerintah digunakan untuk komsumsi produk-produk UMKM.

3. Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing

Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar. Alternatif yang ditawarkan anatara lain adalah penghapusan proteksi infant industry mendorong tercapainya iklim persaingan dan orientasi lembaga koperasi kearah bisnis yang dalam hal ini fungsi kontrol diperlukan.

c. Pengembangan sumber daya manusia

Perbaikan sumber daya manusia diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan dan pusat-pusat penelitian. Selain itu pengembangan SDM juga dapat dilakukan melalui pembinaan terhadap usaha kecil secara rutin dan berkelanjutan yang harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.

3. Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Purwati, 2012:147) dampak merupakan suatu pengaruh yang menimbulkan suatu akibat, atau benturan yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan perubahan baik secara positif maupun negatif. Pengaruh sendiri merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Definisi lain dampak menurut Soemarwoto (dalam Purwati, 2012:147) adalah suatu perubahan sebagai aktivitas dan aktivitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan perubahan keadaan baik secara positif maupun negatif akibat adanya aktivitas manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dampak lebih diartikan sebagai luaran yang diperoleh akibat adanya pengembangan usaha, luaran yang dimaksud berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha.

Dalam penelitian terdahulu ada berbagai macam dampak yang muncul akibat adanya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tejasari (2008:61) tentang peranan sektor usaha kecil, dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyimpulkan bahwa jumlah unit usaha UKM, kredit modal kerja, dan PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rifa'i (2013:136) tentang efektifitas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM krupuk ikan berdampak pada meningkatkan pendapatan serta produksi krupuk ikan yang juga berdampak pada eksistensi usaha itu sendiri. Dari hasil-hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya program pengembangan yang dilakukan terhadap UMKM berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat khususnya pada penyerapan tenaga kerja dan juga pada peningkatan produksi yang dihasilkan UMKM yang nantinya mempengaruhi pendapatan pelaku usaha.

E. Pembangunan Kawasan Perikan dan Kelautan

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara fungsional bertanggung jawab dalam pembangunan perikanan dan kelautan termasuk dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan. Wilayah pesisir dan lautan memiliki potensi yang berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Minapolitan merupakan istilah baru dalam konsep pembangunan

nasional yang mengacu kepada pembangunan wilayah berbasis kepada aktifitas ekonomi perikanan dan kelautan beserta jasa-jasa penunjangnya. Minapolitan tidak dapat dilepaskan dengan konsep pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Keduanya memiliki substansi bahasan yang relatif sama. Penggunaan istilah Minapolitan populer dan menjadi program unggulan dalam rangka visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu "Indonesia Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar" (Nugroho dan Dahuri, 2012:277).

1. Revolusi Biru

Kementrian dan Kelautan Perikanan 2010 (Nugroho dan Dahuri, 2012:284) menyusun visi "Indonesia Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2012" dan misi "Mensejahterahkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". Visi dan misi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berpihak pada rakyat, mampu membuka kesempatan kerja serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun konsep kebijakan Revolusi Biru.

Secara umum Revolusi Biru diartikan sebagai perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi kelautan. Implementasi konsep revolusi biru didasari atas asumsi-asumsi pembangunan dengan merubah kerangka pemikiran kontinen menjadi kepulauan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berimbang. Perimbangan tersebut dibutuhkan selain untuk meningkatkan

pemanfaatan sumber daya laut atau perairan, tetapi juga untuk mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya darat.

Perubahan konsep pembangunan tersebut diperlukan untuk memberikan arah pembangunan sesuai dengan potensi yang ada serta tuntutan perubahan lingkungan di masa depan. Revolusi biru memiliki empat pilar, yaitu:

- a. Perubahan cara pikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim,
- b. Pembangunan berkelanjutan,
- c. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan,
- d. Peningkatan pendapatan rakyat yang adil dan merata.

2. Minapolitan

Revolusi Biru dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah melalui konsep Minapolitan. Nugroho dan Dahuri (2012:285) menjelaskan bahwa “Minapolitan berasal dari kata mina berarti ikan, dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan”. Kegiatan ekonomi dan kelautan umumnya berada di pedesaan yang lambat berkembang akibat terbatasnya sarana, prasarana dan kapasitas sumber daya manusianya. Dengan menerapkan konsep Minapolitan pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan mampu dipercepat dengan pendekatan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, penggerak utama Minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra

produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan dan perdagangan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan, juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan Minapolitan (Nugroho dan Dahuri, 2012:286).

a. Konsep Minapolitan

Nugroho dan Dahuri (2012:286) menjelaskan Minapolitan memiliki dua unsur utama, yaitu:

- a. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah
- b. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan

Minapolitan dalam pelaksanaannya menerapkan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan empat prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip integrasi diharapkan mampu mendorong alokasi sumber daya pembangunan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan atau dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintah tingkat pusat dan daerah, serta kalangan dunia usaha dan masyarakat.
- 2) Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien dan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti sistem memperpendek mata rantai produksi sesuai kebutuhan, sehingga mampu menghasilkan produk-produk kompetitif secara ekonomi.
- 3) Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem maupun sumber daya manusia. Konsep Minapolitan memungkinkan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara intensif.
- 4) Prinsip percepatan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan melalui inovasi dan kebijakan terobosan untuk peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat dunia.

Konsep Minapolitan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per.12/men/2010 tentang Minapolitan, didasarkan

pada tiga azas, yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas, 3) penguatan daerah dengan prinsip daerah kuat-bangsa dan negara kuat. Tiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam proses pembangunannya.

b. Sasaran dan Tujuan Minapolitan

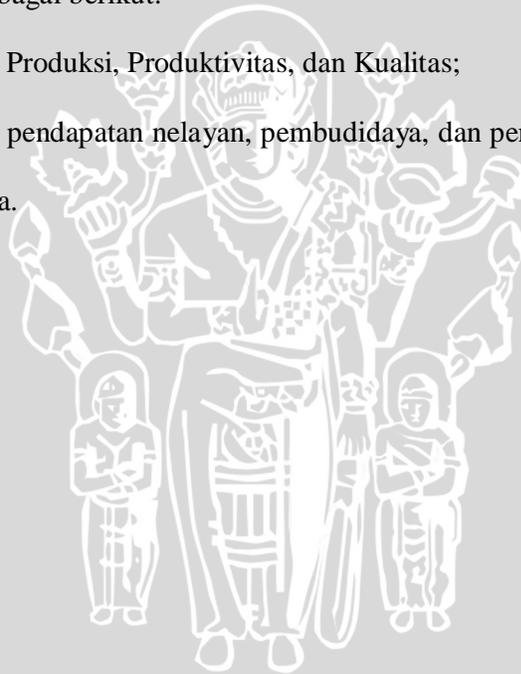
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Minapolitan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per.12/men/2010 tentang Minapolitan, yaitu;

- 1) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, diantaranya:
 - a. Penghapusan dan/ atau pengurangan biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan yang efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. Pemberian bantuan teknis dan permodalan;
 - e. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah keatas sehingga berdaya asing tinggi, antara lain berupa:
 - a. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tariff dan non tariff *barriers*);
 - d. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 - e. Pengembangan sistem intensif dan disintensif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

- 3) Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain:
 - a. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. Pengemabangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksai, pengolahan dan pemasaran

Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Produksi, Produktivitas, dan Kualitas;
- 2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang adil dan merata.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan/ mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis, faktual untuk dianalisis dengan cermat dan mendalam.

Definisi penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2009:5) adalah jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan dan menganalisa fenomena-fenomena dan fakta-fakta. Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sebagai wilayah pengembangan kawasan Minapolitan, serta menyangkut pula faktor-faktor lain yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempersepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam

penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh, batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus (Moleong, 2009:12). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan.
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi:
 - 1) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB);
 - 2) Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia UMKM;
 - b. Bantuan Permodalan Usaha; serta
 - c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).
2. Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan Bagi Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Muncar:
 - a. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Pembudidaya;
 - b. Meningkatnya Sosial Ekonomi Masyarakat.
3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan.
 - a. Faktor Penghambat
 - b. Faktor Pendukung

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang disebut dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian yang dimaksud di sini

adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banyuwangi Serta Kecamatan Muncar. Alasan peneliti memilih DKP sebagai lokasi penelitian karena sebagai instansi terkait yang berhubungan langsung dalam pengembangan UMKM berbasis sektor kelautan dan perikanan atau Minapolitan, selain itu lokasi penelitian lainnya adalah Kecamatan Muncar. Kecamatan Muncar dipilih karena memiliki potensi lahan yang cukup besar sebagai daerah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang budidaya perikanan baik budidaya laut, payau dan tawar. Selain itu Kecamatan Muncar juga merupakan daerah inti pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi.

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya pada Bidang Perikanan Budidaya serta Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang ada di Kecamatan Muncar. Situs penelitian tersebut didasarkan bahwa tempat-tempat tersebut akan diperoleh validitas data yang berhubungan dengan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2009:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketetapan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian

dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai dua jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah, data yang diperoleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang berhubungan langsung dengan pengembangan UMKM berbasis Minapolitan serta kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang ada di Kecamatan Muncar. Dimana untuk mendapatkan data primer ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat bantu lainnya. Sumber data primer didapatkan langsung dari sumbernya (subyek penelitian) yang langsung berhubungan dengan peneliti dan maupun memberikan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan artikel-artikel serta arsip-arsip yang ada relevansinya dengan penelitian. Data yang peneliti ambil berasal dari dokumen dan arsip-arsip dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan jurnal di internet.

2. Sumber Data

Arikunto (2006:129) menjelaskan bahwa dalam rangka mempermudah dan mengklarifikasikan data, sumber data dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu:

- a. *Person*, yaitu sumber data bisa memeberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban tertulis melalui angket atau quesioner.
- b. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, simbol, dan lainnya.
- c. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

Untuk itu, peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Informan, peneliti dalam menentukan informasi awal melakukan pengamatan terlebih dahulu dan pra riset, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk mendapatkan informan selanjutnya, peneliti meminta kepada informan awal untuk menentukan

siapa aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

- b. Dokumen, yakni teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.
- c. Tempat atau peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data yang penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data serta informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*).

2. Observasi

Cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai dokumen, baik berupa buku, laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian dan dari pendapat-pendapat para ahli berbagai tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama. Berikut instrumen penelitian, antara lain:

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan panduan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik yang ditetapkan.

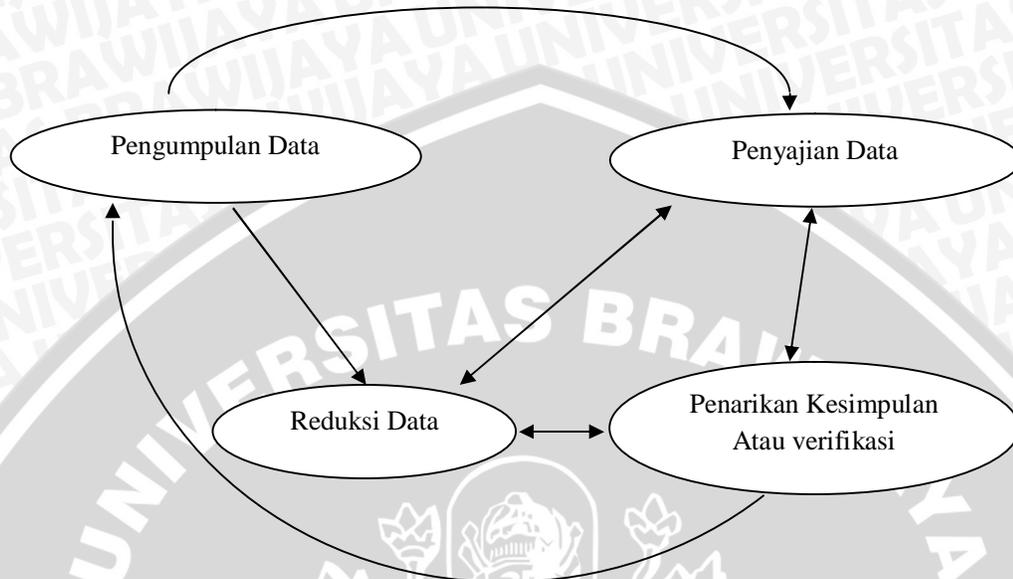
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuannya agar terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati.
3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan menggunakan alat tulis, fotokopi, dan peralatan lain yang dapat dipakai dalam hal tersebut.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2009: 248) adalah proses pengkoordinasian dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles and Huberman yang sering disebut sebagai analisis data model interaktif.

Adapun tahap-tahap analisis data kualitatif sebagai berikut di bawah ini :



Gambar 2 Model Analisis Data Miles dan Huberman

Mencermati gambar 2 di atas, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011, 247-253) berpandangan bahwa analisis data kualitatif memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid.
- 2) Reduksi data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- 3) Penyajian data, peneliti menyusun informasi yang didapatkan. Kemudian digunakan dalam melaporkan hasil penelitian, sehingga mudah untuk dipahami.
- 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam hal ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Muncar

Kecamatan Muncar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang terkenal sebagai sentra penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Muncar terletak pada "08°23'00"- 08°31'00" LS, "114°15'00"-114°23'00" BT. Letak geografis suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas manusia berdasarkan lingkungan sekitarnya serta dapat menentukan tingkat aksesibilitas daerah tersebut. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Muncar merupakan daerah yang berdekatan dengan pantai serta berbatasan langsung dengan selat bali yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan guna perekonomian daerah sekitarnya. Dengan letak geografis tersebut Kecamatan Muncar sangat cocok bagi perkembangan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sektor perikanan baik skala industri maupun rumahan.

Kecamatan Muncar memiliki panjang garis pantai \pm 13km dan \pm 5km diantaranya dimanfaatkan sebagai area pendaratan ikan khususnya hasil tangkapan dari selat bali. Dilihat dari kondisi fisik wilayahnya, Kecamatan Muncar termasuk kedalam daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar antara 0-8%. Sebagai daerah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut

Kecamatan Muncar juga sangat cocok dikembangkan sebagai daerah budidaya perikanan khususnya budidaya air payau yang saat ini tersentralisasi di desa Wringinputih maupun budidaya air tawar yang tersebar di seluruh Kecamatan Muncar.

a. Letak Administratif

Kecamatan Muncar terletak di bagian timur dari Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar memiliki luas wilayah 14.607 ha, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Rogojampi
Sebelah Selatan	: Kecamatan Tegaldlimo
Sebelah Timur	: Selat Bali
Sebelah Barat	: Kecamatan Cluring dan Srono

Dengan adanya batasan wilayah administratif maka akan semakin memperjelas cakupan kerja pemerintahan Kecamatan Muncar dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Selain itu dengan adanya batasan tersebut, maka dapat dilihat perbedaan-perbedaan antara suatu wilayah dan wilayah lainnya yang dapat digunakan bagi pemerintahan suatu daerah untuk mengatur dan merencanakan pembangunan wilayahnya. Wilayah administrasi Kecamatan Muncar terbagi atas 10 Desa terdiri dari Kedungrejo, Tembokrejo, Blambangan, Sumberberas, Sumbersewu, Wringinputih, Tambakrejo, Kumendung, Tapanrejo, Kedungringin.

b. Pemanfaatan Lahan

Tabel 2 Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Muncar Berdasarkan Jenis Lahan

No.	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Permukiman	1,713.16
2	Perkebunan	1,170.51
3	Tanggul Pasir	80.08
4	Padang Rumput	44.08
5	Tanah Ladang	257.00
6	sawah Irigasi	4,569.25
7	Tambak	547.65
8	Industri	57.02
9	Lapangan	1.37
10	Makam	4.09
11	Perkantoran	2.17
12	Perdagangan dan Jasa	32.27
13	Peribadatan	11.75
14	Kesehatan	1.45
15	Pendidikan	12.78
Jumlah		8,504.63

(Sumber: RUDTK Kecamatan Muncar Tahun 2009-2019)

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemanfaatan lahan terbesar di Kecamatan Muncar untuk sawah irigasi sebesar 4,569 ha, Permukiman 1,713 ha, Perkebunan 1,170 ha, Tambak 547,65 ha Tanah Ladang 257 ha, serta penggunaan lahan lain termasuk penggunaan lahan untuk industri sebesar 57 ha dengan jumlah keseluruhan luas lahan 8,509 ha. Banyaknya luas lahan untuk industri di Kecamatan Muncar di dominasi oleh industri pengolahan hasil perikanan yang tersentra di Desa Kedungrejo dan Desa Tembokrejo. Banyaknya industri pengolahan hasil perikanan di dua desa tersebut dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan pantai dan Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) Muncar,

sehingga memungkinkan untuk dikembangkannya kawasan industri pengolahan hasil perikanan di daerah tersebut.

Kecamatan Muncar memiliki 82 Industri pengolahan hasil perikanan, terdiri dari industri pengalengan ikan, *cold storage*, minyak ikan, tepung ikan dan sebagainya. Banyaknya industri pengolahan di Kecamatan Muncar menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Kabupaten Banyuwangi. Salah satu industri pengolahan di Kecamatan Muncar adalah PT. Maya Muncar yang bergerak pada industri pengalengan ikan yang hasil produksi telah mencakup tingkat nasional melalui produk sarden ABC dan GAGA. Banyaknya jumlah industri pengolah hasil perikanan tersebut menjadi pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk menjadikan Kecamatan Muncar sebagai kawasan perikanan terpadu atau Minapolitan.

c. Tenaga Kerja

penduduk terbesar bekerja pada bidang pertanian yang mencapai 27.680 jiwa, industri sebesar 9.432 jiwa, dagang 11, 688 jiwa, angkutan 1,531 jiwa, jasa 7.048 jiwa, dan sektor lainnya 3.409 jiwa. Sebagai daerah penghasil produk perikanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Muncar juga bermata pencaharian di bidang perikanan baik sebagai nelayan maupun pembudidaya ikan. Pada tahun 2012 penduduk yang bekerja disektor perikanan mencapai 14.451 jiwa diantaranya 13.200 jiwa sebagai nelayan perairan laut, 1.091 jiwa sebagai petani atau pembudidaya ikan, 60 jiwa sebagai nelayan perairan umum.

Tabel 3 Banyaknya Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011

Desa	Pertanian	Industri	Dagang	Angkutan	Jasa	Lainnya
Sumberberas	3,379	692	2,055	178	1,181	671
Wringinputih	3,197	386	811	103	640	323
Kedungringin	2,480	632	945	86	415	382
Tambakrejo	2,270	279	251	20	254	196
Tapanrejo	1,834	500	316	70	472	226
Blambangan	1,139	1,192	525	136	823	246
Kedungrejo	5,134	1,389	2,943	384	1,346	486
Tembokrejo	5,205	1,836	3,040	406	1,472	414
Sumbersewu	1,460	1,357	434	66	239	207
Kumendung	1,582	1,169	368	82	242	258
TOTAL	27,680	9,432	11,688	1,531	7,084	3,409

(Sumber: Kecamatan Muncar Dalam Angka Tahun 2012)

d. Pengembangan Minapolitan di Kecamatan Muncar

Kawasan Minapolitan dikembangkan atas dasar potensi kelautan dan perikanan yang ada di daerah. Kecamatan Muncar merupakan kawasan pesisir dengan hasil perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Besarnya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar didukung dengan besarnya potensi perikanan utamanya di selat bali utamanya komoditas lemuru. Selain itu besarnya perikanan tangkap di Kecamatan Muncar juga didukung adanya Pelabuhan Perikan Pantai (PPP) yang terletak di Desa Kedungrejo.

Tabel 4 Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Muncar Tahun 2002-2010

Tahun	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
2002	23,150,543	54,775,807,500
2003	34,058,841	60,110,214,900
2004	23,777,539	49,369,591,900
2005	11,565,876	21,885,458,600
2006	58,815,285	90,443,097,100
2007	60,393,648	87,494,873,200
2008	35,756,636	112,724,026,500
2009	32,782,997	82,090,947,000
2010	22,046,289	98,394,406,500

(Sumber: Kecamatan Muncar dalam angka tahun 2012)

Pada tahun 2002 produksi perikanan tangkap di Kecamatan Muncar mencapai 23.150 ton, tahun 2003 34.058 ton, tahun 2004 mencapai 23.777 ton, tahun 2005 11.565 ton, tahun 2006 58.815 ton, tahun 2007 mencapai 60.393 ton, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami tren penurunan. Pada tahun 2008 produksi perikanan tangkap di Kecamatan Muncar mencapai 35.782 ton, tahun 2009 produksi 32.782 ton, tahun 2010 mencapai 22.046. ton, namun hasil perikanan tangkap di Kecamatan Muncar masih yang tertinggi jika dibandingkan dengan hasil perikanan tangkap di Kecamatan lainnya.

Selain perikanan tangkap, Kecamatan Muncar juga memiliki potensi di bidang perikanan budidaya dan bidang pengolahan hasil perikanan. Untuk perikanan budidaya saat ini masih di dominasi budidaya air payau dan budidaya air tawar. Budidaya air payau di Kecamatan Muncar tersentralisasi di Desa

Wringinputih dengan luas areal tambak sebesar 575,70 ha. Kecamatan Muncar juga merupakan wilayah penghasil budidaya perikanan air tawar yang tersebar hampir diseluruh desa, dengan jenis ikan yang dihasilkan antara lain mujair, nila, lele, belut, katak, bader, bekicot, tombro, tawes, gurame, mujaer, nila.

Tabel 5 Luas Tambak di Desa/ Kelurahan Kecamatan Muncar

No.	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Wringin putih	575,70
2	Kedungringin	15,60
3	Tembokrejo	23,70
4	Sumbersewu	33,10
5	Kumendung	48,30
Jumlah		696,40

(Sumber: RUDTK Kecamatan Muncar Tahun 2009-2019)

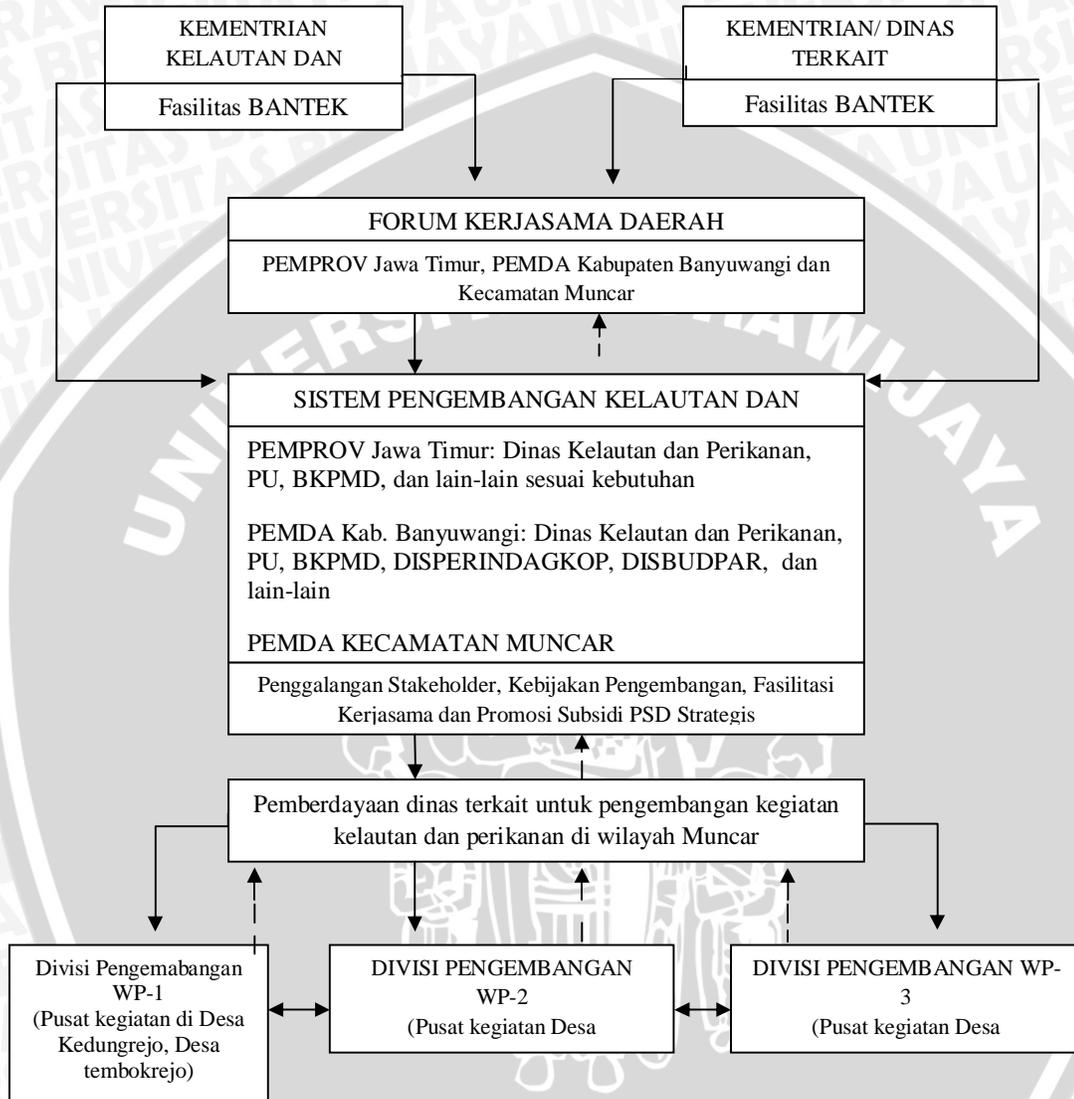
Kecamatan Muncar juga merupakan sentra pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Muncar memiliki 335 unit pengolah hasil perikanan baik skala industri maupun skala rumahan. Usaha pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Muncar terdiri dari industri pengalengan ikan, tepung ikan, cold storage, minyak ikan serta pengolahan skala rumahan seperti pemindangan, pengasinan, pengesan, pengolah terasi dan petis ikan.

Tabel 6 Banyaknya Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenisnya di Kecamatan Muncar Tahun 2010

No.	Jenis Usaha Pengolahan		Jumlah
1	Perusahaan	Pengalengan Ikan	14
		Cold Storage	51
		Tepung Ikan Pabrikan	15
		Minyak Ikan	2
2	Perorangan	Pemindangan	99
		Pengasinan	28
		Peng "es" an Ikan	48
		Tepung Ikan	71
		Pembuat Terasi	1
		Pembuatan Petis	6
		Total	

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)

Berdasarkan potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan tersebut maka Kecamatan Muncar tepat untuk dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Minapolitan ditujukan untuk memaksimalkan potensi daerah khususnya dibidang kelautan dan perikanan guna pembangunan perekonomian daerah dan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Gambar 3 Rencana Zonasi Minapolitan Kecamatan Muncar

Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan pemerintah berpegangan pada pedoman rinci kawasan Minapolitan Muncar 2010-2014. Dalam rangka implementasi pengembangan kawasan Minapolitan, melalui rencana zonasi pemerintah daerah melakukan pembagian wilayah di Kecamatan

Muncar menjadi beberapa wilayah pengembangan (WP). Pembagian wilayah pengemabngan atau WP didasari pada : Kecenderungan yang ada, fungsi atau kedudukan wilayah pengembangan didalam wilayah yang lebih luas dan potensi kegiatan kelautan dan perikanan yang berkembang. Berdasarkan analisis pola struktur ruang dan system pergerakan kegiatan dan kelautan dan perikanan yang dilakukan, wilayah pengembangan sektor kelautan dan perikanan di KEcamatan Muncar dibagi menjadi tiga wilayah:

1. WP-1 : pusat pengebangan di Desa Kedungrejo dan Desa Tembokrejo, yang didalamnya termasuk kawasan wilayah kerja operasioanl pelabuhan (WKOPP) Muncar. WP-I diarahkan pada pengembangan sektor industri Kelautan dan Perikanan, Penataan kawasan dan perbaikan lingkungan.
2. WP-2: Pusat pengembangan di Desa Kedungringindan sekitar perairan teluk Pang-pang, Desa Wringinputih, Desa Kumendung, dan Sumbersewu. Daerah pengembangan wilayah ke II difokuskan pada pengembangan perikanan budidaya, baik budidaya laut maupun darat (tambak) dan kegiatan perlindungan Mangrove, estuary dan pantai.
3. WP-3: pengembangan wilayah ke III ini terdiri dari beberapa desa antaranya: Desa Blambangan, Tapanrejo, tambakrejo, dan Desa Sumberwaras. Arahkan pengembangan WP-III dititikberatkan pada pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, serta budidaya air tawar dengan komuditas utama lele.

2. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011, serta telah melakukan restrukturisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 tahun 2011. Setelah mengalami restrukturisasi, maka gambaran umum organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi, Misi Dan Tujuan Dinas Perikanan Dan Kelautan

Visi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan suatu organisasi. Visi dalam suatu organisasi sangat dipegaruhi oleh perubahan lingkungan sekitarnya baik dari internal maupun eksternal organisasi, oleh karenanya visi organisasi harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang ada.

Visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah :
”Terwujudnya Usaha Kelautan dan Perikanan Yang Maju dan Lestari Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat”. Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan
- 2) Mewujudkan usaha budidaya perikanan yang berkembang dan kuat
- 3) Mewujudkan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing
- 4) Meningkatkan kapabilitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
- 5) Mewujudkan sistem pelayanan publik yang baik di bidang pembangunan kelautan dan perikanan
- 6) Mewujudkan tata kelola instansi Dinas Kelautan dan Perikanan yang baik dan bersih.

Dalam melaksanakan misinya Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa tujuan yang ingin dicapai Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan tindakan. Adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

- 1) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan produksi perikanan melalui sektor usaha budidaya perikanan yang berkembang dan kuat.
- 3) Mengoptimalkan nilai produk hasil perikanan.
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan
- 6) Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif

Untuk melihat seberapa jauh tercapainya tujuan dari misi Dinas Kelautan dan Perikanan maka diperlukan suatu indikator yang menjadi acuan pengukurannya melalui sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Tabel 7 Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap 2. Peningkatan jumlah produksi kelompok nelayan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan area konservasi sumberdaya laut
2.	Meningkatkan produksi perikanan melalui sektor usaha budidaya perikanan yang berkembang dan kuat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan budidaya 2. Peningkatan produksi benih BBI dan UPR 3. Peningkatan jumlah produksi kelompok pembudidaya ikan
3.	Mengoptimalkan nilai produk hasil perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan yang baik dan higienis 2. Peningkatan konsumsi makan ikan per kg/kap/tahun
4.	Meningkatkan kemandirian masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah cakupan bina kelompok nelayan 2. Peningkatan jumlah cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 3. Peningkatan jumlah sarana-prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan
5.	Meningkatkan kepercayaan publik untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik
6.	Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	

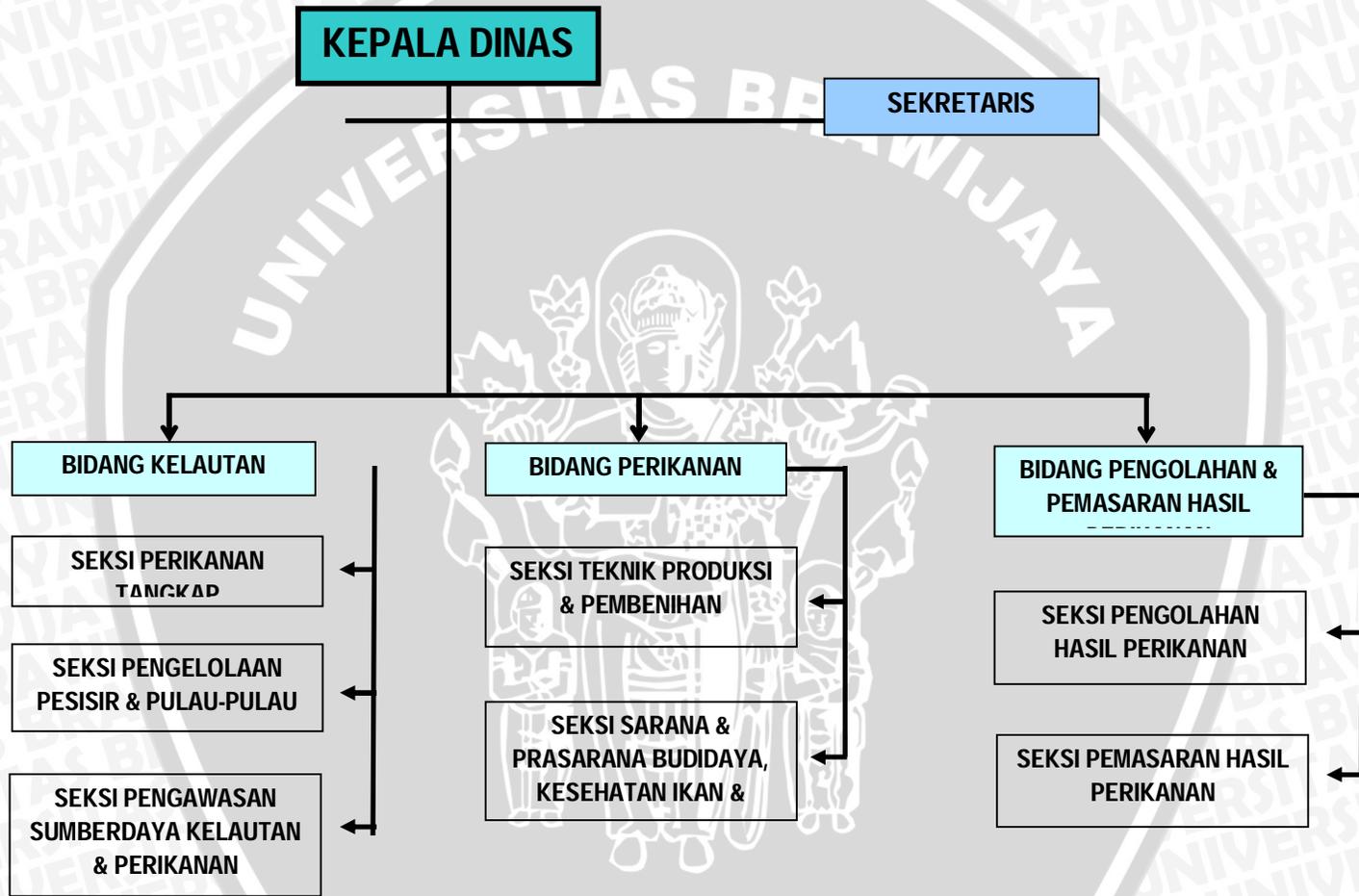
(Sumber: Laporan Akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, 2012).

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

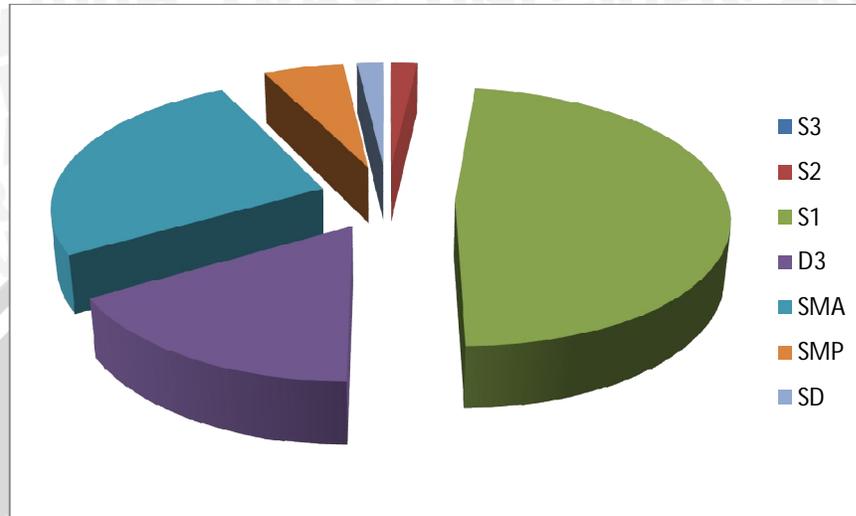
dari :

1. Kabid. Kelautan, yang dibantu oleh :
 - a. Kasi. Perikanan Tangkap
 - b. Kasi. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - c. Kasi. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Kabid. Perikanan, dibantu oleh :
 - a. Kasi. Teknik Produksi dan Perbenihan
 - b. Kasi. Sarana dan Prasarana Budidaya
3. Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dibantu oleh :
 - a. Kasi. Pengolahan Hasil Perikanan
 - b. Kasi. Pemasaran Hasil Perikanan
4. Jabatan Fungsional



Gambar 4 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

d. Komposisi dan Jumlah Pegawai



Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Total jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 adalah 54 orang. Berdasarkan grafik di atas, untuk pegawai dengan klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) tidak ada. Strata 2 (S2) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 1,8% persen dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 26 orang dengan proporsi 48,15 persen dari keseluruhan jumlah pegawai, klasifikasi D3 berjumlah 9 orang atau sebesar 16,67 persen dari jumlah pegawai, untuk klasifikasi SMA/SMK berjumlah 14 orang dengan proporsi 25,92 persen dari seluruh jumlah pegawai. Dan Klasifikasi SMP dan SD berjumlah 4 orang dengan proporsi 7,41 persen dari agregat jumlah pegawai.

e. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 8 Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

NO	SASARAN	KEBIJAKAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi produksi perikanan tangkap 2. Peningkatan jumlah produksi kelompok nelayan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan area konservasi sumberdaya laut 	Melaksanakan Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan budidaya 2. Peningkatan produksi benih BBI dan UPR 3. Peningkatan jumlah produksi kelompok pembudidaya ikan 	Melaksanakan program pengembangan budidaya perikanan
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan yang baik dan higienis 2. Peningkatan konsumsi makan ikan per kg/kap/tahun 	Melaksanakan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah cakupan bina kelompok nelayan 2. Peningkatan jumlah cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 3. Peningkatan jumlah sarana-prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan sarana/prasarana penangkapan atau budidaya 2. Melaksanakan pembangunan sarana/prasarana penunjang kegiatan usaha kelautan dan perikanan.
5.	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan public	Melaksanakan program penunjang peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan public.

(Sumber: LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012.)

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, program pembangunan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
4. Program Optimalisasi Pengeloan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan program pembangunan diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
 - a. Pengendalian dan Pengawasan Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - a. Pengembangan bibit ikan unggul;
 - b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan;

- c. Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan;
 - d. Perlindungan Sumberdaya Perikanan (Barkanli);
 - e. Pengadaan peralatan distribusi/panen induk dan benih;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap;
 - b. Sosialisasi monitoring, & evaluasi;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
 4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - a. Gerakan memasyarakatkan makan ikan.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
 - c. Pendampingan pada kelompok pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan :
 - a. Penyusunan perencanaan detail pembangunan kawasan kelautan dan perikanan (DED Kawasan TPI Grajagan);
 - b. Penyusunan perencanaan kawasan minapolitan (RPIJMD Bidang Kawasan Minapolitan Banyuwangi).

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Minapolitan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan suatu wujud nyata dari terselenggaranya perekonomian masyarakat yang merata, dimana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. UMKM juga merupakan suatu usaha yang memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian masyarakat secara makro maupun mikro. Perkembangan UMKM terus mengalami peningkatan, sehingga juga berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran serta kemiskinan yang ada pada struktur masyarakat. Namun dalam upaya pengembangannya UMKM umumnya mengalami berbagai macam hambatan seperti terbatasnya modal usaha yang digunakan, sulitnya pemasaran produk, dan utamanya masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, begitu juga yang dialami oleh UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar. Pengelolaan UMKM di Kecamatan Muncar sebagian besar masih dilakukan secara traditional, sehingga berdampak pada lambatnya pengembangan usahanya. Selain itu, pengelolaan usaha budidaya yang dilakukan secara traditional ini juga berpengaruh pada hasil produksi yang didapat dan berdampak langsung pada kesejahteraan pembudidaya itu sendiri. Hal ini didukung oleh salah satu wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Bpk. Suryono Bintang S, SP yang mengatakan bahwa:

“hampir 80 persen usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar masih tergolong kedalam usaha Mikro yang pengelolaannya masih dilakukan secara traditional baik segi manajemen usaha maupun teknik budidayanya, itu dipengaruhi karena masih minimnya pengetahuan pembudidaya khususnya yang baru memulai usaha dibidang budidaya perikanan. Untuk mengatasi problem itu, dari dinas sendiri berupaya untuk merubah pola pengelolaan

usaha budidaya perikanan secara tradisional tersebut, untuk meningkatkan hasil produksi budidaya yang nantinya juga memberikan dampak pada pendapatan pembudidaya sendiri. (wawancara, tanggal 7 februari 2014)".

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai upaya-upaya pengembangan yang dirumuskan kedalam strategi pengembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menetapkan beberapa strategi yang berpedoman pada Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan salah satu wawancara dengan Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Ibu Yulinanti Pilumami, S.Pi yang menyatakan:

“ Dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan, dinas itu mengacu pada renstra yang ada, kemudian dilaksanakan melalui tindakan-tindakan berupa pemberdayaan bagi pembudidaya seperti membentuk kelompok usaha bersama (KUB) dan pembinaan dan pelatihan. Selain itu juga ada pemberian paket bantuan dan juga peningkatan mutu Balai Benih Ikan (BBI) (wawancara, 11 Februari 2014).

Implementasi strategi pengembangan UMKM budidaya perikanan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan guna mereduksi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha budidaya perikanan di Kabupaten Banyuwangi umumnya termasuk di Kecamatan Muncar guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kawasan Minapolitan yaitu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan diartikan sebuah kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan agar mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Strategi pemberdayaan yang

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan UMKM budidaya perikanan di bagi menjadi tiga strategi utama, yaitu:

1. Melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui Pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) sebagai langkah penguatan kelembagaan usaha budidaya perikanan serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia UMKM budidaya perikanan agar mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya.
2. Memberikan paket bantuan permodalan guna mempercepat pengembangan usaha budidaya perikanan khususnya bagi usaha yang pengelolaanya belum optimal dan usaha-usaha yang baru dirintis.
3. melakukan pengembangan pada Balai Benih Ikan agar mampu memenuhi kebutuhan bibit unggul bagi pembudidaya ikan.

a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha, mikro, kecil dan menengah budidaya perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pembinaan dan pelatihan khususnya terhadap usaha budidaya yang telah berjalan namun pengelolaanya masih dilakukan secara traditional serta pembudidaya yang baru memulai usaha budidaya perikanan melalui pelatihan manajemen usaha serta tehnik budidaya yang benar. Pembinaan yang dilakukan terhadap usaha budidaya perikanan diawali dengan pengarahan atau sosialisasi yang dilaksanakan dibalai desa kepada pembudidaya agar membentuk suatu Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam bentuk kelompok pembudidaya ikan

(POKDAKAN). Upaya pembentukan kelompok usaha bersama ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan proses pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan, selain itu juga dapat menjadi wadah pembelajaran bagi pembudidaya karena dengan dibentuknya kelompok ini setiap anggota kelompok bisa saling bertukar pengalaman guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahanya. Salah satu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Ibu Yulinanti Pilumami, S.Pi, yang mengatakan:

“Tujuan diadakannya pembentukan kelompok ini agar para pelaku usaha budidaya perikanan ini dapat secara bersama-sama mengembangkan usahanya, sehingga nantinya jika ditemui permasalahan atau hambatan dapat dihadapi dan ditanggung bersama agar permasalahan yang dihadapi menjadi lebih ringan (wawancara, 11 Februari 2014)”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat salah satu anggota POKDAKAN bapak Nur Kholis, yang mengatakan:

“Saya bergabung dengan kelompok ini baru, sebelum bergabung saya masih sering bingung kalau ada masalah pada usaha saya. Saat ini kalo ada masalah sering dibicarakan di diskusi kelompok sehingga pemecahannya masalah yang saya hadapi penyelesaiannya jauh lebih ringan karena dibantu dengan anggota lainnya yang punya pengalaman lebih dibanding saya (wawancara, 21 Februari 2014)”.

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan kelompok pembudidaya perikanan, antara lain:

1. Anggota kelompok terdiri dari pembudidaya ikan;
2. Alamat anggota berada disatu desa (satu keluarga hanya satu orang yang boleh menjadi anggota);
3. Jumlah anggota 10 s/d 30orang;

4. Mempunyai kegiatan rutin, seperti: pertemuan kelompok, arisan, dan sebagainya;
5. Memiliki sturuktur organisasi;
6. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
7. Memiliki administrasi (buku tamu, agenda surat masuk/ keluar, daftar hadir, buku daftar anggota serta pengurus, buku kas, notulen dan sebagainya).

Untuk saat ini menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, pembentukkan kelompok usaha bersama belum terlaksana secara optimal karena masih banyaknya pembudidaya yang belum mendapatkan sosialisasi akan program Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Belum optimalnya sosialisasi pembentukkan kelompok usaha bersama ini karenakan minimnya jumlah personil yang ada serta terkendala pada luasnya wilayah sosialisasi yang tidak hanya dilakukan pada Kecamatan Muncar tetapi mencakup Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan yang terdiri dari 24 Kecamatan. Selain itu permasalahan yang dihadapi juga mengenai pola pikir sebagian pembudidaya yang masih berpikiran bahwa berkelompok tidak memberikan manfaat terhadap pengembangan usahanya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Bpk. Suryono Bintang S, SP mengatakan:

“Saat ini proses sosialisasi pembentukkan kelompok usaha bersama(KUB) ini masih terkendala pada minimnya jumlah personil yang bisa turun kelapangan sehingga tidak semua pembudidaya mengetahui program ini. Selain itu ada juga beberapa pembudidaya yang tidak mau bergabung dalam kelompok, mereka beranggapan bahwa dengan berkelompok itu tidak memberikan manfaat bagi usaha mereka (wawancara, 7 Februari 2014).”

Selanjutnya Kepala Bidang Perikanan Budidaya Bpk Suryono Bintang, SP menambahkan:

“ Untuk menarik minat pembudidaya agar bergabung dalam kelompok usaha bersama, dinas menerapkan strategi dengan menyediakan paket bantuan usaha yang disalurkan melalui kelompok. Padahal pembentukkan kelompok ini nanti akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mereka sendiri, jadi kita beri pancingan dulu melalui paket bantuan itu untuk menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya KUB (wawancara, 7 Februari 2014)”.

Terbentuknya kelompok usaha bersama budidaya perikanan ini akan memberikan dampak positif pada pengembangan usaha serta mempercepat tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku usaha budidaya perikanan. Selain itu pembentukkan kelompok juga dapat menjadi pembelajaran berorganisasi yang nantinya akan menumbuhkan keahlian baru bagi pelaku usaha itu sendiri.

2. Pembinaan dan pelatihan

Pembinaan dan pelatihan diberikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta *skill* pelaku usaha yang dapat diterapkan dalam pengelolaan usahanya. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pembentukkan KUB, namun Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan pembinaan berdasarkan permintaan dari kelompok yang ada. Sebagai mana hasil wawancara dengan ibu Yulinanti Pilumami, S.Pi yang mengatakan:

“ Pembinaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisai KUB untuk menghemat waktu di lapangan. Selain itu dinas juga sering memberikan pelatihan kembali bagi kelompok-kelompok yang sudah pernah dibina sebelumnya, dengan cara pengajuan proposal kedinas (wawancara, 11 Februari 2014)

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan lebih ditekankan pada kesadaran pembudidaya sendiri untuk mengembangkan pengetahuan dan skill pada bidang usaha yang dijalankannya atau dapat dikatakan

menggunakan model pendekatan Bottom-up yang mengutamakan partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka tujuan pelaksanaan pemberdayaan untuk pengembangan UMKM lebih cepat tercapai. Pada tahun 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan dan pelatihan pada 11 POKDAKAN di Kecamatan Muncar.

Tabel 9 Pembinaan POKDAKAN di Kecamatan Muncar Tahun 2013

Desa	Kelompok	Anggota
Kedungrejo	1. Karya Mina Lele	10
	2. Mina Bahari	10
Tapanrejo	3. Banyu Anugrah	10
	4. Sinar Tirta	10
Wriginputih	5. Nisa	12
	6. King King	12
	7. Mina Surya	10
Tembokrejo	8. Mega Segara	12
	9. Ompak Songo	12
	10. Karya Laut	12
	11. Minak Jinggo	12

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan)

Pada UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar yang saat ini masih dikelola secara traditional, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan yang mencakup manajemen usaha serta teknik cara budidaya ikan baik (CBIB). Manajemen memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu usaha. Kurangnya keahlian dibidang manajemen ini membuat beberapa pelaku usaha melakukan beberapa kesalahan seperti kesalahan marketing maupun kesalahan pada perhitungan biaya produksi. UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar yang sebagian besar dikelola secara traditional masih belum menerapkan manajemen usaha yang benar, bahkan

pembukuan serta akutansi sederhana sekalipun. Hal ini didukung dengan wawancara pembudidaya Bapak Nur Kholis yang mengatakan:

“Sebelumnya saya tidak pernah melakukan pencatatan pembukuan, untuk hasil yang saya dapat dari usaha budidaya ini dicampur dengan biaya untuk hidup sehari-hari sehingga modal yang seharusnya untuk usaha lagi bisa terpakai tanpa sadar yang terkadang membuat saya agak kesusahan untuk memulai usaha lagi (wawancara, di rumah bapak Nur Kholis 21 Februari 2014)”.

Belum diterapkannya manajemen usaha ini membuat UMKM budidaya perikanan sulit untuk dapat berkembang guna menghadapi persaingan ketat dunia usaha saat ini. Mereduksi permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan skill manajemen usaha pembudidaya agar dapat diterapkan dalam pengelolaan usahanya. Pelatihan manajemen usaha yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini masih sebatas pelatihan pembukuan serta akutansi sederhana. Pelatihan manajemen usaha ditujukan agar pelaku budidaya memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya dengan baik, efisien dan mampu meraih kesuksesan. Salah satu wawancara dengan Ibu Yulinanti Pilumami S.Pi Kasi Teknik dan Pembenihan, mengatakan:

“Untuk pembinaan manajemen usaha pada sumber daya manusia UMKM budidaya perikanan dilaksanakan melalui pelatihan pembukuan sederhana yang berhubungan dengan produksi serta keuangan usahanya. Saat ini masih pembukuan sederhana karena kita dari dinas melihat kapasitas sumber daya manusia UMKM budidaya perikanan yang masih belum mampu jika diberikan manajemen usaha seperti usaha yang sudah professional, selain itu jika memaksa melakukan manajemen usaha yang rumit ditakutkan justru masyarakat tidak mau untuk dilatih. Dengan adanya pelatihan manajemen usaha diharapkan pengelolaan UMKM budidaya perikanan lebih dapat terorganisir dengan baik sehingga pengembangan usaha yang diharapkan lebih cepat tercapai (wawancara 11 Februari 2014)”.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga meliputi aspek teknik budidaya. Teknik budidaya yang diterapkan sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil produksi UMKM. Oleh karenanya, pengelolaan usaha budidaya perikanan sangat membutuhkan kemampuan teknik budidaya yang benar untuk mengoptimalkan hasil produksi yang didapat dan tidak dapat dilaksanakan secara asal-asalan. Umumnya ada beberapa kesalahan teknik yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya tradisional tergantung pada jenis budidaya yang dilakukan, untuk budidaya air tawar kesalahan yang sering ditemui ada pada proses penebaran benih. Kebanyakan dari mereka menebarkan benih yang melebihi kapasitas kolam dengan harapan hasil produksi yang didapat lebih banyak. Teknik benebaran benih yang berlebihan justru membuat perkembangan benih yang ada tidak merata sehingga mengakibatkan banyak benih justru mati dan berdampak pada menurunnya hasil produksi yang didapat. Hal ini didukung wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Bapak Suryono Bintang S, SP yang mengatakan:

“Kebanyakan pembudidaya air tawar khususnya yang baru memulai ingin cepat-cepat memetik hasil dari usahanya dengan menebarkan benih sebanyak-banyaknya. Hal tersebut justru berdampak sebaliknya karena kepadatan benih dalam satu kolam akan berpengaruh pada perkembangan benih yang ada. Penebaran benih sebaiknya dilakukan dengan cara memperhatikan kapasitas kolam tampung yang ada, sehingga pertumbuhan benih dapat merata dan mengurangi jumlah benih yang gagal produksi. Untuk budidaya air tawar secara tradisional ini hasil panen yang didapat hanya kisaran 50-65% dari benih yang ditebar (wawancara, 12 Februari 2014).

Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya air payau di Kecamatan Muncar yang pengelolanya masih banyak dilakukan dengan teknik dan teknologi

ekstensif atau traditional umumnya mengalami kegagalan akibat banyaknya serangan penyakit. Untuk serangan penyakit yang paling berbahaya bagi komoditas budidaya air payau khususnya udang di tahun 2011 masih didominasi oleh Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) dan Taura Syndrome Virus (TSV) dengan prosentase kematian udang yang terserang rata-rata mencapai $\pm 25 \%$. Prosentase kematian masih relatif kecil dibandingkan jika udang terserang White Spot Syndrome Virus (WSSV) yang dapat menyebabkan kematian 100%. Serangan White Spot Syndrome Virus (WSSV) yang mendominasi penyakit berbahaya mulai tahun 1995 – 2000 pada udang windu dan menyerang udang vaname mulai tahun 2005 sampai sekarang walaupun prosentase serangan relatif rendah. Tinggi nya angka serangan penyakit tersebut tidak diantisipasi oleh pelaku usaha budidaya traditional dengan menggunakan obat kimia, hal tersebut diperparah dengan buruknya persiapan lahan untuk praproduksi serta tidak diterapkannya penggunaan teknologi pendukung seperti pompa serta kincir. Hal ini didukung oleh wawancara salah satu pembudidaya air payau traditional bapak Ali Mustofa yang mengatakan:

“Kami petani udang traditional sering menghadapi permasalahan pada banyaknya bibit yang gagal panen sehingga membuat hasil produksi yang didapat sedikit bahkan terkadang hanya cukup menutupi biaya produksi. Kebanyakan angka bibit hidup hingga panen hanya sebesar 60% dari total bibit yang ditebar. Bahkan pernah tahun 2000an ketika masih menggunakan benih udang windu gagal panen hampir mencapai 100%, membuat kami enggan untuk melanjutkan usaha budidaya udang ini” (wawancara, 25 Februari 2014)”.

Selanjutnya Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bapak Markuat Agus, SP menambahkan:

“Pengelolaan budidaya air payau tradisional yang khususnya banyak dilakukan oleh usaha budidaya skala mikro di Kecamatan Muncar, proses produksinya masih tergantung pada alam dan belum menerapkan penggunaan obat kimia untuk mengurangi jumlah bibit yang terserang penyakit. Selain itu belum adanya teknologi-teknologi tambahan yang harusnya dipergunakan, dikarenakan terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh pembudidaya skala mikro (wawancara, 13 Februari 2014)”.

Untuk meningkatkan kemampuan teknik pembudidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memberikan pelatihan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) serta menerapkan penggunaan Obat Ikan Kimia Biologi (OIKB). CBIB merupakan sebuah konsep bagaimana memelihara ikan, agar ikan yang dibudidayakan memiliki kualitas yang baik dan mampu meningkatkan daya saing produk. Untuk budidaya air tawar Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan CBIB, sementara untuk budidaya air payau selain menerapkan CBIB juga dikombinasikan dengan penggunaan OIKB. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Bapak Markuat Agus, SP menambahkan:

“Untuk pelatihan teknik ini dinas mengajarkan CBIB serta penggunaan OIKB. Teknik ini terbukti mampu mengurangi jumlah bibit yang gagal panen dengan tingkat keberhasilan hingga 90-95%. Selain itu kualitas produksi yang didapat jauh lebih unggul dibandingkan pengelolaan yang masih dilakukan secara tradisional (wawancara, 13 Februari 2014)”.

Dengan diterapkannya teknik budidaya yang benar tentunya akan mengurangi jumlah kegagalan panen yang dialami dan berdampak lurus pada peningkatan pendapatan pembudidaya. Selain itu juga kualitas hasil produksi yang didapat jauh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan secara tradisional. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Ali Mustofa yang mengatakan:

“Setelah adanya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan hasil produksi yang didapat jauh lebih baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sebelum adanya pelatihan hasil yang didapat dengan size 150 per kg, setelah adanya pelatihan dan penerapan OIKB size yang didapat mencapai 100-125 per kg yang tentunya juga meningkatkan nilai jual dari produksi yang didapat (wawancara, 25 Februari 2014)”.

Namun hasil dari pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku usaha budidaya di Kecamatan Muncar tidak dapat dikatakan berjalan optimal. Ada sebagian pembudidaya yang telah diberikan dan pelatihan, namun tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Menurut sebagian pembudidaya, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih ditingkatkan intensitasnya. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Suheriyanto selaku pembudidaya air tawar yang menyatakan:

“Pembinaan yang dilakukan dinas masih kurang optimal karena hanya dilakukan sesekali saja, seharusnya pelatihan-pelatihan itu dilakukan secara rutin sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan dapat lebih terserap oleh kami (wawancara, 24 Februari 2014).”

b. Bantuan Permodalan Usaha

Modal merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam mengembangkan suatu usaha. Tanpa adanya modal, pengembangan usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Usaha mikro, kecil dan menengah umumnya menghadapi permasalahan pada terbatasnya modal usaha guna pengembangan usahnyaa. Hal ini umumnya dikarenakan UMKM merupakan usaha perorangan yang sifatnya tertutup, dengan hanya mengandalkan modal sendiri yang sifatnya terbatas. Selain itu terbatasnya modal usaha juga dikarenakan masih sulitnya akses

UMKM untuk melakukan Kredit pada lembaga perbankan yang mengharuskan pinjaman disertai dengan agunan.

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan modal usaha berupa peralatan atau sarana penunjang produksi kepada pelaku usaha budidaya yang disalurkan melalui kelompok usaha bersama (KUB). Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibu Yulinanti Pilumami selaku Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan:

“Untuk membantu pelaku usaha budidaya perikanan, pemerintah daerah memberikan paket bantuan modal berupa sarana penunjang produksi. Saat ini bantuan dari pemerintah daerah hanya berupa sarana penunjang seperti bantuan peralatan produksi, bantuan bibit atau benih dan bantuan pakan yang dinilai sangat berguna bagi pengembangan usaha budidaya khususnya bagi masyarakat yang baru memulai usaha budidaya ini. Sementara untuk bantuan modal aktif atau berupa uang pemerintah daerah belum menyediakan sehingga masyarakat harus mandiri untuk mencari pada pihak perbankan (wawancara, 11 Februari 2014).”

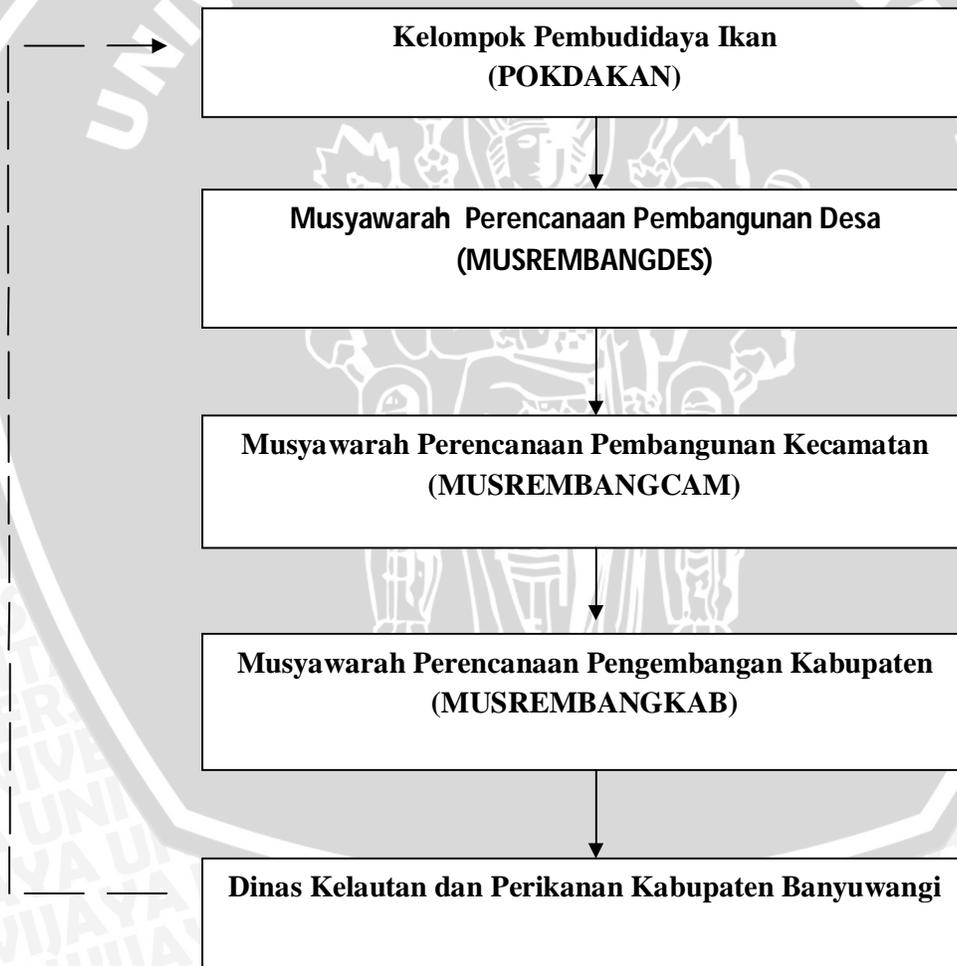
Pemberian bantuan paket modal usaha berupa sarana penunjang produksi ini diprioritaskan bagi kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan juga tidak menutup kemungkinan memberikan paket bantuan kepada POKDAKAN yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan dengan persyaratan menerima paket bantuan yang berbeda dan dalam jangka waktu. Menurut Ibu Yulinanti Pilumami, S.Pi selaku Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Kriteria atau persyaratan yang

harus dipenuhi pelaku usaha budidaya perikanan untuk memperoleh paket bantuan adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk kelompok dibuktikan dengan berita acara pembentukan kelompok;
2. Kelompok pembudidaya ikan tidak boleh berasal dari PNS, anggota TNI/POLRI;
3. Mengajukan proposal kepada Bupati Banyuwangi, Tembusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
4. Mempunyai kelompok yang berkesinambungan, minimal telah beraktifitas 1 tahun;
5. Mempunyai surat ijin usaha perorangan (SIUP) dan memiliki alamat yang jelas;
6. Bantuan dapat diajukan oleh instansi pemerintah, TNI/POLRI dan bukan untuk perorangan PNS, TNI/POLRI.

Pemberian paket bantuan modal untuk UMKM membutuhkan peranan aktif partisipasi masyarakat. Masyarakat atau pelaku usaha budidaya perikanan dapat mengajukan paket bantuan modal melalui kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengajukan proposal paket bantuan. Proposal yang diajukan berisi tentang kebutuhan kelompok yang sebelumnya telah dibahas di pertemuan internal kelompok, setelah itu di proposal diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES). Pada tahap MUSREMBANGDES dilakukan musyawarah terhadap kelompok-kelompok yang mengajukan proposal bantuan, untuk memilih proposal mana yang akan diteruskan pada tahap selanjutnya berdasarkan urgensi dan kebutuhan kelompok akan paket bantuan permodalan tersebut. Setelah diusulkan dalam MUSREMBANGDES proposal yang diajukan

secara sistematis melewati hirarki pemerintah daerah dan masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan masuk kedalam Kecamatan selanjutnya masuk kedalam musyawarah perencanaan kabupaten (MUSREMBANGKAB) dengan tembusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Untuk alur pengajuan proposal bantuan paket modal usaha budidaya perikanan dapat dilihat pada skema permohonan bantuan permodalan.



Gambar 6 Alur Pengajuan Paket Bantuan Modal Usaha

Selain pemberian paket bantuan modal usaha, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi juga memiliki dua program unggulan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan, yaitu Program 10000 Kolam Pekarangan untuk pengembangan budidaya air tawar serta Program Revitalisasi Tambak untuk pengembangan budidaya air payau. Program 10000 Kolam Pekarangan dilatar belakangi masih belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya air tawar yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dari 1000 ha lahan potensial hanya baru dimanfaatkan sebesar 174,50 ha. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Suryono Bintang S, SP yang mengatakan:

“Program 10000 kolam pekarangan merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan hasil produksi budidaya air tawar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program 10000 kolam dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa sarana pembentuk kolam seperti terpal dan pemberian bantuan sarana produksi melalui rekomendasi kelompok. program ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kolam budidaya air tawar yang ada sehingga nantinya juga mampu meningkatkan hasil produksi serta berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (wawancara, 12 Februari 2014)”.

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan data hasil produksi budidaya air tawar tahun 2008-2011, dimana semakin meningkatnya jumlah lahan yang digunakan berbanding lurus dengan peningkatan hasil produksi yang didapat.

Tabel 10 Perkembangan Hasil Produksi Budidaya Air Tawar Tahun 2008-2012

Tahun	Produksi	Nilai	Luas (ha)
2008	303.585	2.602.692.250	145,93
2009	408.3	4.250.750.000	145,93
2010	1.517.850	13.139.436.500	146,47
2011	2.051.242	19.924.460.000	169,54
2012	2.451.624	25.556.660.000	174,50

(Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012)

Maksud dan tujuan dari Gerakan 10.000 kolam pekarangan ini adalah :

1. Mendukung program pembangunan perikanan budidaya;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan budidaya;
3. Mendukung program pelestarian sumberdaya perairan dan ikan dari penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab;
4. Merubah perilaku masyarakat dari berburu / menangkap menuju usaha budidaya;
5. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
6. Meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat (gemarikan);
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat .

Tabel 11 Jumlah Bantuan Kolam Kecamatan Muncar Tahun 2013

No.	Desa	Orang	Petak Kolam	Luas (m)
1	Kedungrejo	32	138	3696
2	Kedungringin	1	4	280
3	Sumberberas	10	36	506
4	Tambakrejo	1	4	186
5	Tapanrejo	30	100	1524
6	Tembokrejo	34	78	2125
TOTAL		108	360	8317

(Sumber: Rekap Program 10000 Kolam Pekarangan, diolah)

Pada program 10000 kolam pekarangan di Kecamatan Muncar yang merupakan daerah pengembangan perikanan terpadu atau Minapolitan pada tahun 2013 mendapatkan bantuan sebanyak 360 petak kolam dengan luas 8.317 m untuk 108 pembudidaya. Dengan adanya program 10000 kolam pekarangan ini mampu meningkatkan jumlah produksi usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya air tawar di Kecamatan Muncar yang juga memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung pernyataan salah satu pembudidaya yang mendapatkan bantuan kolam dari program 10000 kolam pekarangan Bapak Nur Kholis yang mengatakan:

“Adanya program 10000 kolam pekarangan sangat membantu bagi kami pembudidaya kecil untuk dapat mampu meningkatkan hasil produksi. Sebelumnya saya hanya memiliki 2 buah kolam pembesaran dengan jumlah produksi 1 siklus rata-rata sebesar 300-450 kg, setelah adanya bantuan kolam dari Dinas Kelautan dan Perikanan kini hasil produksi saya dalam satu siklus mencapai 1 Ton lebih yang juga semakin meningkatkan pendapatan yang saya dapat (wawancara, di rumah bapak Nur Kholis tanggal 21 Februari 2014)”.

Selain program 10000 kolam pekarangan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki program unggulan lainnya yaitu program revitalisasi tambak. Program revitalisasi tambak ditujukan untuk menghidupkan kembali tambak idle atau terbengkalai. Tujuan dari program revitalisasi tambak antara lain untuk meningkatkan jumlah tambak yang layak operasi serta meningkatkan produksi tambak dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara sasaran program revitalisasi tambak antara lain tambak intensif yang idle, tambak intensif namun belum optimal, serta tambak traditional ditingkatkan menjadi traditional plus atau semi intensif.

Implementasi program revitalisasi tambak di Kabupaten Banyuwangi, dilaksanakan di 8 Kecamatan yang merupakan sentra budidaya air payau yaitu: Kecamatan Pesanggaran, Tegaldlimo, Muncar, Rogojampi, Kabat, Wongsorejo, Kalipuro, dan Banyuwangi. Pelaksanaan program revitalisasi tambak hanya berupa peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan saluran air, pengadaan pompa untuk pembudidaya traditional, pembangunan reservoir serta penanggulangan abrasi tambak. Kecamatan Muncar merupakan wilayah dengan rencana revitalisasi tambak terbesar mencapai 390 ha dari total revitalisasi keseluruhan 610 ha. Besarnya rencana revitalisasi tambak tersebut dikarenakan banyaknya tambak idle dan juga banyaknya pengelolaan budidaya air payau secara traditional di Kecamatan Muncar. Selain itu revitalisasi tambak di Kecamatan Muncar juga diintegrasikan dengan percepatan pengembangan kawasan Minapolitan. Salah satu wawancara dengan Bapak Markuat Agus SP

selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mengatakan:

“Program revitalisasi tambak saat ini sebatas pembangunan sarana dan prasaran seperti perbaikan saluran irigasi, pengadaan pompa dan pembangunan reservoir dan juga perbaikan pada tanggul tambak akibat abrasi pantai. Untuk saat ini revitalisasi tambak paling banyak dilakukan di Kecamatan Muncar, selain banyaknya jumlah tambak idle di Kecamatan Muncar juga untuk percepatan pengembangan kawasan Minapolitan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tambak traditional menjadi traditional plus hingga semi intensif (wawancara, 12 Februari 2014)”.

Pernyataan diatas juga didukung dengan data rencana revitalisasi tambak di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 12 Potensi Tambak Kabupaten Banyuwangi

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Idle (ha)	Rencana Revitalisasi
1	Pesanggaran	37	15	-
2	Tegaldlimo	75	20	25
3	Muncar	554	65	390
4	Rogojampi	143	15	75
5	Kabat	129	25	50
6	Wongsorejo	320	40	40
7	Kalipuro	1,2	-	-
8	Banyuwangi	122	30	30
TOTAL		1.381	210	610

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, diolah)

c. Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sangat peduli terhadap pengembangan BBI yang merupakan ujung tombak dari progam pengembangan perikanan budidaya. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana BBI terus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas BBI. Kabupaten Banyuwangi saat ini mengelola dua Balai Benih

Ikan(BBI). BBI tersebut terletak di Kecamatan Kabat dan Genteng. Pada tahun 2011 telah dilakukan pembangunan di kedua BBI yaitu pembangunan dinding kolam, saluran dan bak pembenihan. Gambaran dan tingkat produksi dari masing-masing BBI sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

BBI Genteng terletak di Kecamatan Genteng. Memiliki luas lahan sebesar 1,539 Ha. Sampai dengan tahun 2011 fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh BBI Genteng antara lain gedung kantor, gedung kantor UPP, 7 bak penampungan benih, bak pengendapan, 8 bak penampungan induk, 11 kolam pendederan, saluran outlet & inlet, gedung workshop (yang kondisinya perlu perbaikan), sumur bor dan tendon air (kondisinya belum mampu memenuhi kebutuhan air di BBI). Dengan sarana/prasarana yang ada pada tahun 2011 BBI Genteng dapat menghasilkan benih sebanyak 1.433.250 ekor, sedangkan produksi tahun 2010 sebanyak 1.209.000 ekor, yang berarti mengalami kenaikan sebesar $\pm 18 \%$.

BBI Pakistaji berlokasi di Kecamatan Kabat. Sarana dan prasarana yang dimiliki BBI Pakistaji antara lain : gedung kantor BBI, laboratorium, aula, rumah jaga 3 kolam pemijahan, 3 kolam pendederan, 4 kolam induk dan 12 kolam pemberokan. Tahun 2011 BBI Pakistaji menghasilkan produksi benih sebanyak 1.365.000 ekor. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang produksinya sebanyak 1.117.500 ekor. Peningkatan ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terus menerus melakukan peningkatan terhadap sarana /prasarana BBI. Benih-benih yang dihasilkan oleh BBI Pakistaji adalah Lele, Tombro, Nila, dan Gurame

Dari kedua BBI ini dihasilkan ikan : Tombro, Tawes, Nila, Nila Merah, Lele dan lain-lain, dengan jumlah total tahun 2011 sebanyak 2.798.250 ekor yang bila dibandingkan dengan produksi tahun 2010 sebanyak 2.326.500 ekor, mengalami peningkatan sebesar $\pm 20\%$. Dengan adanya peningkatan produksi tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan benih-benih unggul bagi pelaku usaha budidaya perikanan. Ini didukung pernyataan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Bapak Suryono Bintang S, SP yang menyatakan:

“Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya akan bibit atau benih unggul. Untuk merealisasikan hal tersebut dinas melakukan pengembangan terhadap sarana dan prasarana pendukung Balai Benih Ikan untuk dapat meningkatkan hasil produksi BBI (wawancara, 13 Februari 2014)”.

2. Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan Bagi Perekonomian Masyarakat

Secara makro maupun mikro usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kedudukan, potensi, serta peranan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mewujudkan terjadinya pemerataan pembangunan bagi masyarakat khususnya pembangunan di bidang perekonomian. Peranan penting UMKM tersebut dapat dilihat dalam berbagai macam aspek seperti penyedia kesempatan usaha yang dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, penyedia lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekspor. Selain peranan tersebut usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki daya tahan atau *resistensi* yang cukup kuat dalam menghadapi krisis-krisis ekonomi yang terjadi karena usaha ini memiliki

karakteristik yang lebih fleksibel dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal yang mampu diandalkan guna menjaga ketahanan ekonomi. Namun, dalam pengembangannya UMKM masih menemui berbagai macam hambatan diantaranya: 1) masih rendahnya tingkat produktifitas, 2) rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan masih menggunakan manajemen usaha yang masih bersifat traditional, 3) serta masih lemahnya aspek permodalan yang dimiliki.

Berbagai macam hambatan atau persoalan tersebut tentunya akan memperlambat proses pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan nantinya juga akan berdampak pada eksistensi usaha itu sendiri. Oleh karenanya, dibutuhkan peranan berbagai macam pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan UMKM baik itu dari pihak pelaku usaha sendiri dan utamanya dari pihak pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dan bertahan dari persaingan usaha di era keterbukaan atau globalisasi saat ini, termasuk UMKM budidaya perikanan yang ada di Kecamatan Muncar. Dengan adanya strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui strategi pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan permodalan dan pengembangan balai benih ikan (BBI) mampu memberikan dampak positif khususnya bagi pembudidaya ikan serta masyarakat pada umumnya. Adapun dampak atau hasil dari diterapkannya strategi pengembangan UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar

diantaranya meningkatnya pendapatan pelaku usaha budidaya perikanan dan juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang ada disekitar usaha tersebut.

a. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Pembudidaya

Upaya-upaya pengembangan UMKM berbasis Minapolitan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi ditujukan agar nantinya UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar mampu secara mandiri mengembangkan usahanya yang juga akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan tingkat pendapatan pada urutan pertama sebagai indikator kesejahteraan ekonomi yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan merupakan motor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terhadap UMKM budidaya di Kecamatan Muncar secara umum mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha budidaya. Sebelum adanya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pendapatan dari pembudidaya masih tergolong minim dan sering merugi akibat rendahnya hasil produksi. Hal ini didukung oleh salah satu anggota pokdakan bapak Nur Kholis yang mengatakan:

“Sebelum adanya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, saya hanya memiliki satu kolam dengan produksi 1 siklus sebesar 80-100 kg dengan pendapatan bersih rata-rata 250-450ribu tiap bulannya disamping pendapatan saya sebagai buruh pabrik. Setelah adanya pelatihan-pelatihan dan program 10000 kolam pekarangan, pendapatan yang didapat setiap bulannya mengalami penigkatan. Dari 4 buah kolam yang saya miliki produksi yang didapat kisaran 1000-1300 kg dengan rata-rata pendapatan yang didapat sebesar rp.2.200.000-2.600.000 tiap bulannya (wawancara, 21 Februari 2014)”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Samsul selaku ketua POKDAKAN

Raja Lele yang mengatakan:

“Saya memulai usaha budidaya pada tahun 2004 dengan modal awal hanya 2 buah kolam pembesaran, sejak tahun 2008 kami membentuk kelompok raja lele dan mulai dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini usaha yang saya miliki sudah berkembang cukup pesat dengan memiliki kolam pembesaran sebanyak 10 buah kolam sementara untuk pendapatan sendiri tiap bulannya jika dibandingkan tidak kalah dengan PNS eselon 2, selain itu saya juga mendapatkan tambahan pemasukan dengan melakukan pengolahan terhadap hasil produksi budidaya lele seperti krupuk lele, dan abon lele, nugget dan sedang mencoba membuat lele kaleng atau sarden (wawancara, dirumah bapak samsul tanggal 25 Februari 2014)”.

Dengan adanya strategi-strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mampu meningkatkan hasil produksi yang nantinya juga berdampak pada peningkatan pendapatan pembudidaya di Kecamatan Muncar. Hal ini juga didukung dengan data perkembangan produksi budidaya air tawar tahun 2012-2013 di Kecamatan Muncar.

Tabel 13 Perkembangan Produksi Budidaya Air Tawar di Kecamatan Muncar 2012-2013

Bulan	2012		2013	
	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
Januari	22,257	208,375,000	22,370	207,970,000
Februari	25,148	232,950,000	25,165	231,350,000
Maret	33,070	305,325,000	32,970	304,425,000
April	86,345	785,925,000	56,968	595,810,000
Mei	80,925	737,000,000	77,033	795,830,000
Juni	86,595	785,375,000	79,270	878,250,000
Juli	64,985	592,375,000	77,375	1,000,987,500
Agustus	47,980	439,800,000	48,935	796,800,000
September	37,415	346,150,000	38,300	621,725,000
Oktober	37,925	344,675,000	70,260	939,762,500
November	39,425	358,125,000	70,575	948,675,000
Desember	33,150	303,000,000	73,980	1,001,400,000
TOTAL	595,220	5,439,075,000	673,201	8,322,985,000

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, diolah)

Pada tahun 2012 produksi dari sektor perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Muncar secara berturut-turut pada tribulan ke I sebesar 80.475 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 746.650.000, tribulan ke II 253.865 kg dengan nilai produksi Rp. 2.308.300.000, tribulan ke III 150.380 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.378.325.000, dan pada tribulan ke IV sebesar 110.500 kg dengan nilai Rp. 1.005.800.000. Total produksi budidaya air tawar pada tahun 2012 sebesar 595.220 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 5.430.750.000. Selanjutnya pada tahun 2013 produksi budidaya air tawar di Kecamatan Muncar secara berturut-turut tribulan I sebesar 80.505 kg dengan nilai Rp. 743.745.000, tribulan II 213.271 nilai Rp. 2.269.890.000, tribulan ke III 164.610 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 2.419.512.500 dan tribulan ke IV produksi mencapai 214.815 kg dengan nilai produksi Rp. 2.889.837.500. Total Produksi pada tahun 2013 mencapai 8.322.985.000 meningkat sebesar 11% dari tahun 2012. Kontribusi terbesar pada produksi budidaya air tawar masih didominasi komoditas budidaya lele.

Tabel 14 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau di
Kecamatan Muncar 2012-2013

Bulan	2012		2013	
	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
Januari	286,600	12,764,250,000	287,360	12,795,200,000
Februari	346,900	15,515,000,000	346,475	15,497,250,000
Maret	194,200	8,635,750,000	193,600	8,624,750,000
April	164,850	7,337,500,000	146,800	6,451,750,000
Mei	147,300	6,562,500,000	148,900	6,667,250,000
Juni	121,850	5,435,500,000	147,315	6,626,975,000
Juli	81,975	3,614,625,000	132,170	9,668,900,000
Agustus	102,150	4,526,000,000	150,250	11,020,725,000
September	136,300	6,073,000,000	162,190	11,924,700,000
Oktober	111,800	4,991,000,000	111,800	8,173,625,000
November	131,030	5,876,325,000	131,030	9,634,275,000
Desember	103,225	4,585,625,000	103,225	7,474,850,000
TOTAL	1,928,180	85,917,075,000	2,061,115	114,560,250,000

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)

Produksi budidaya air payau saat ini masih didominasi komoditas udang venamei, pada tahun 2012 produksi budidaya air payau berturut-turut pada tribulan ke I sebesar 827.700 kg dengan nilai produksi Rp. 36.915.000.000, tribulan ke II mencapai 434.000 kg dengan nilai Rp. 19.335.500.000, tribulan ke III produksi sebesar 320.425 kg dengan nilai Rp. 14.213.625.000, dan tribulan ke IV produksi budidaya air payau sebesar 346.055 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 15.452.950.000. Selanjutnya, pada tahun 2013 produksi budidaya air payau pada tribulan ke I mencapai 827.435 kg dengan nilai 36.917.200.000, tribulan ke II 443.015 kg nilai Rp. 19.745.975.000, tribulan ke III produksi sebesar 444.610 kg dengan nilai Rp. 32.614.325.000, dan pada tribulan ke IV produksinya mencapai 346.055 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 25.282.750.000. Total produksi budidaya air payau di Kecamatan Muncar

mencapai 2.061.115 kg mengalami peningkatan sebesar 6,5% dari tahun 2012 yang total produksinya mencapai 1.928.180 kg. Besarnya produksi budidaya air payau masih di dominasi oleh usaha-usaha skala menengah dan besar sementara kontribusi usaha mikro pada produksi budidaya air payau masih terbilang minim. Hal ini didukung pendapatan Bapak Markuat Agus, SP selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang mengatakan:

“ untuk saat ini produksi budidaya air payau di Kecamatan Muncar masih didominasi hasil produksi usaha skala besar yang berbentuk badan usaha dengan tujuan ekspor, sementara untuk produksi usaha mikro, kecil, dan menengah masih terbilang rendah dan hanya mencakup pasar dalam negeri walaupun ada beberapa yang pemasarannya sudah masuk ke tingkat eksportir (wawancara, 13 Februari 2014)”

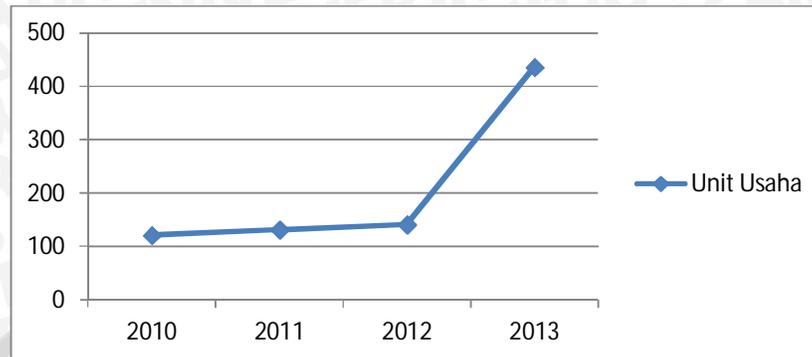
b. Meningkatnya Sosial Ekonomi Masyarakat

Program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar selain mampu meningkatkan kesejahteraan pembudidaya juga mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang berada di sekitar lingkungan usaha budidaya perikanan. Keberhasilan usaha budidaya perikanan untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya mampu menarik minat masyarakat yang sebelumnya bekerja dibidang lain seperti petani dan nelayan untuk beralih kebidang budidaya perikanan. Hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku Ketua Pokdakan Raja Lele, menyatakan:

“pada awal saya memulai usaha budidaya tahun 2004, masih sedikit masyarakat di sekitar lingkungan saya yang berkecimpung di bidang budidaya ini. Kebanyakan masyarakat saat itu termasuk saya berpikiran bahwa usaha budidaya ini kurang menjanjikan dari aspek penghasilan yang didapat maupun aspek keamanannya. Namun lama kelamaan masyarakat mulai banyak tertarik pada usaha budidaya perikanan setelah melihat kesuksesan-kesuksesan yang didapat oleh pembudidaya khususnya setelah adanya pengembangan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pada awal

pembentukan kelompok anggota kami hanya ada 10 orang dan terus bertambah jumlahnya hingga kelompok raja lele dijadikan pusat pelatihan budidaya lele oleh kementerian kelautan dan perikanan. Bahkan saat ini hampir seluruh masyarakat di dusun saya beralih ke bidang budidaya, yang kebanyakan sebelumnya bekerja sebagai petani dan nelayan (wawancara, 295 Februari 2014).

Pernyataan Bapak Samsul tersebut juga selaras dengan data mengenai perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Muncar. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi jumlah unit UMKM budidaya perikanan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 2010 jumlah unit UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sebanyak 121 unit yang tergabung kedalam 17 kelompok usaha bersama (KUB), selanjutnya jumlah UMKM budidaya perikanan pada tahun 2011 sebanyak 131 unit usaha dalam 18 kelompok usaha bersama. Pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi 141 unit usaha yang tergabung dalam 19 kelompok usaha bersama, dan pada tahun 2013 jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 436 unit usaha yang tergabung kedalam 30 kelompok usaha bersama (KUB).



Gambar 7 Perkembangan UMKM Di Kecamatan Muncar Tahun 2010-2013

Berdasarkan data tersebut jumlah wirausahawan baru dibidang budidaya perikanan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain mampu menumbuhkan wirausahawan baru, usaha mikro, kecil dan menengah juga mampu menyerap tenaga kerja, walaupun tenaga kerja yang terserap tidak sebesar sektor industri. Untuk besarnya jumlah tenaga kerja pada usaha budidaya perikanan ini tergantung pada banyaknya kolam yang dimiliki. Dari hasil observasi peneliti terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar, rata-rata satu unit usaha dengan jumlah kolam antara 3-5 buah membutuhkan jumlah tenaga kerja 1-2 orang. Namun jumlah tenaga kerja tersebut dapat bertambah jika pembudidaya melakukan diversifikasi usaha seperti melakukan pengolahan terhadap hasil produksi budidaya yang didapat. Diversifikasi dapat berupa produk hulu ke hilir, pada sektor budidaya perikanan dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan seperti membuat kerupuk ikan, abon ikan bahkan ikan kaleng (sarden). Ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Samsul yang mengatakan:

“ untuk tenaga kerja sendiri tergantung jumlah kolam yang dimiliki, kalau anggota kelompok raja lele rata-rata memiliki tenaga kerja 1-2 orang. Saya

sendiri ada 3 orang yang saya pekerjakan untuk membantu usaha budidaya saya, selain itu saya juga memperkejakan ibu-ibu sekitar rumah saya yang jumlahnya 13 orang untuk membantu membuat produk olahan lele yang saat ini hanya berupa krupuk lele dan abon lele (wawancara, 25 Februari 2014).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti dilapangan masih ada beberapa kendala dihadapi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan di Kecamatan Muncar. Hambatan-hambatan tersebut datang dari pihak pemerintah daerah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta dari internal UMKM sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:

a. Faktor Penghambat

1. Minimnya jumlah personil serta kualifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah maka dibutuhkan peranan aktif pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada UMKM yang umumnya masih minim akan pengetahuan maupun skill yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat terlaksana melalui pembinaan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta skill pelaku usaha, agar produksi yang didapat jauh lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk memberikan pelatihan dan pembinaan dibutuhkan tenaga lapang dengan klasifikasi keahlian tertentu yang berhubungan langsung

dengan usaha budidaya perikanan. Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan saat ini jumlah tenaga lapang yang ada masih sangat minim sehingga pembinaan dan pelatihan yang dilakukan belum dapat dikatakan optimal karena masih banyaknya masyarakat belum mendapatkan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Salah satu wawancara dengan Bapak Suryono Bintang ,SP. KABID Perikanan Budidaya mengatakan:

“Saat ini jumlah tenaga lapang yang ada belum mampu untuk meng *cover* pembinaan bagi pembudidaya yang ada diseluruh kabupaten banyuwangi, jumlah staf yang ada di bidang perikanan budidaya hanya sebanyak 6 orang. Walaupun dinas telah melakukan kontrak dengan tenaga penyuluh tetap tidak mampu untuk mengoptimalkan pembinaan bagi pembudidaya yang ada di 24 Kecamatan (wawancara 9 Februari 2014).”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat terbagi menjadi beberapa permasalahan , diantaranya:

- a) Terbatasnya jumlah petugas lapang untuk pelaksanaan teknis kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan di lapangan, serta terbatasnya jumlah staf pegawai yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - b) Masih minimnya komposisi pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait

Upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan pembudidaya ikan dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB). Keberadaan KUB tersebut, bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan yang diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun, pembentukan kelompok usaha bersama tidak selamanya

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan akibat adanya kendala-kendala yang dihadapi seperti:

- a) Ketidakmampuan kelompok dalam membantu pengembangan anggotanya akibat minimnya intensitas pelatihan dan pembinaan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya kelompok-kelompok yang beranggotakan wirausahawan baru dibidang budidaya perikanan yang minim akan pengalaman dibidang budidaya.
- b) Belum adanya koordinasi dan sinergi antar KUB guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya KUB yang mengalami kondisi stagnan.

Ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Samsul yang menyatakan:

“ Dalam pengembangan usaha ini, kami melakukan dengan cara sendiri khususnya teknik-teknik budidaya yang mampu mengoptimalkan kualitas dan kuantitas hasil produksi diluar dari teknik teknik yang diajarkan oleh dinas. Untuk teknik itu sendiri hanya saya bagikan kepada anggota kelompok saya saja, sementara untuk kelompok budidaya lainnya dapat saya bantu kalau mereka memang meminta, namun itu jarang sekali mereka lakukan (wawancara, 25 Februari 2014)”.

3. Terbatasnya akses UMKM kepada sumber permodalan produktif

Modal merupakan sumber penting dalam pengembangan suatu usaha. Dalam kasus pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar, ada sebagian pembudidaya yang masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan untuk mengembangkan usahanya. Permodalan dari lembaga perbankan dapat digunakan baik sebagai modal usaha maupun modal investasi untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun untuk mengembangkan produknya. Adanya bantuan modal usaha dari

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berupa sarana dan prasarana penunjang produksi masih dinilai belum optimal oleh pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan jika tidak ditunjang dengan adanya permodalan berupa *financial* keuangan tersebut. Sementara untuk mendapatkan modal tersebut pembudidaya masih kesulitan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan, diakibatkan adanya persyaratan administratif seperti harus adanya agunan yang tidak dapat dipenuhi pelaku usaha budidaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut para pembudidaya berinisiatif untuk melakukan pinjaman diluar perbankan dengan bunga yang cukup membebani pembudidaya, sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang didapat dari usahanya. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Samsul yang menyatakan:

“untuk saat ini ada masih ada beberapa kendala yang dihadapi usaha budidaya ini, walaupun upaya pengembangan yang dilakukan dinas sudah baik. Permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah kesulitan memperoleh dana segar dari bank. Untuk melakukan pinjaman pihak bank mengharuskan peminjam untuk menyediakan agunan sebagai jaminan, sementara pembudidaya tidak dapat memenuhinya utamanya masyarakat yang baru ingin memulai usaha budidaya ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak sedikit masyarakat yang meminjam modal usaha kepada rentenir dengan bunga tinggi yang justru membebani (wawancara, 25 Februari 2014).”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan point-point penghambat usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses permodalan dari lembaga perbankan, yaitu:

- a) Masih tingginya jumlah jaminan atau agunan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan.

- b) Belum tersedianya lembaga-lembaga lain yang mampu menyediakan kebutuhan permodalan tersebut, seperti; koperasi atau lembaga keuangan mikro
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan UMKM budidaya perikanan

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mampu mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan sarana dan prasarana penting yang paling berperan yaitu Balai Benih Ikan (BBI). Sebagai salah satu ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan, BBI berperan dalam penyediaan bahan baku utama yaitu bibit/ benih-benih ikan yang unggul. Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini hanya memiliki dua buah BBI yaitu BBI genteng dan BBI Pakistaji, yang produksinya saat ini belum mampu jika harus memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan yang tidak hanya berada di Kecamatan Muncar namun yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Ibu Yulinanti Pilumami selaku Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan:

“Saat ini jumlah produksi benih yang dihasilkan Balai Benih Ikan belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan. Karena Produksi Balai Benih Ikan ini peruntukannya bagi pembudidaya yang berada di seluruh Kabupaten yang jumlahnya tiap tahun terus mengalami peningkatan (wwawancara, 11 Februari 2014)”.

b. Faktor Pendukung

1. Masih besarnya potensi lahan untuk pengembangan usaha budidaya perikanan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan merupakan salah satu sektor usaha yang banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan Muncar. Banyaknya minat masyarakat untuk bekerja disektor budidaya ini dikarenakan mudahnya untuk memulai usaha budidaya serta pendapatan yang cukup menjajikan dari usaha budidaya. Usaha budidaya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti dipekarangan rumah, ladang, kebun, ataupun persawahan. UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar dapat terus dikembangkan melihat masih banyaknya jumlah lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya ini, seperti:

- a) Adanya garis pantai dengan panjang mencapai 13 Km yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah budidaya air payau.
- b) Masih banyaknya lahan tak terbangun seperti daerah persawahan, ladang, perkebunan, pekarangan rumah yang dapat dialih fungsikan sebagai lahan potensial budidaya air tawar.

2. Adanya dukungan dari pemerintah

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan di Kecamatan Muncar mendapatkan dukungan penuh dari pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diantaranya:

- a) Dukungan dari pemerintah pusat berupa adanya dukungan anggaran untuk pengembangan kawasan Minapolitan yang didalamnya juga mencakup pengembangan usaha budidaya perikanan
- b) Selain itu, dukungan juga datang dari pemerintah daerah berupa program-program yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak.

Hal ini didukung hasil wawancara dengan Ibu Yulinanti Pilumami selaku Kepala Seksi Teknik dan Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi yang mengatakan:

“Untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar ada anggaran sendiri dari pemerintah pusat yang terintegrasi dengan program pengembangan kawasan Minapolitan. Selain itu dari pemerintah daerah sendiri juga menyediakan program untuk pengembangan usaha budidaya seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak (wawancara, 12 Februari 2014)”.

3. Adanya peluang untuk diversifikasi usaha.

Diservikasi usaha merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan keberagaman produk dengan melakukan inovasi pada produk yang ada. Pada usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan diversifikasi usaha dilakukan dengan menciptakan produk dari hulu ke hilir. Produk hasil diversifikasi budidaya perikanan berupa produk olahan ikan seperti krupuk lele, abon, sarden dan produk olahan lainnya. Namun untuk saat ini masih sedikit sekali pembudidaya perikanan di Kecamatan Muncar yang melakukan diversifikasi usaha yang kebanyakan disebabkan masih minimnya modal untuk melakukan diversifikasi usaha serta masih minimnya pengetahuan akan

pengolahan produk hasil budidaya. Hal ini didukung pendapat Bapak Nur Kholis selaku pembudidaya yang mengatakan:

“Untuk saat ini hasil produksi dari usaha budidaya milik saya langsung saya pasarkan dalam bentuk ikan segar, sebenarnya saya ingin mengolahnya tetapi masih terkendala modal dan pengetahuan akan pengolahan yang baik dan benar (wawancara, 21 Februari 2014).”

4. Adanya kemitraan dengan pihak swasta.

Faktor pendukung lainnya dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah budidaya perikanan yaitu adanya kemitraan dengan pihak swasta. Kemitraan yang dilakukan oleh pihak usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan dengan pihak swasta dalam hal penyediaan pakan. Dengan adanya proses kemitraan ini harga pakan yang didapat jauh lebih murah dibandingkan membeli pakan dipasaran, hal ini tentunya mengurangi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Menurut Bapak Samsul selaku ketua kelompok Raja Lele mengatakan:

“Adanya kemitraan dengan pabrik pakan ini tentunya sangat membantu kami selaku pembudidaya, karena harga beli yang ditawarkan lebih murah dibandingkan kita membeli ketoko-toko (wawancara dirumah bapak samsul, 25 Februari 2014)”.

C. Pembahasan

1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis

Minapolitan

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu *trigger* atau pemicu terjadinya pembangunan besar-besaran di daerah. Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Didasari hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berupaya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki khususnya pada wilayah pesisir melalui pengembangan kawasan Minapolitan yang terletak di Kecamatan Muncar. Minapolitan diterapkan dalam rangka optimalisasi potensi pada sektor kelautan dan perikanan untuk pembangunan perekonomian daerah melalui pengembangan sentra produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan hasil perikanan atau kombinasi diantaranya.

Didasari azas demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan prorakyat, pengembangan kawasan Minapolitan juga dapat diterapkan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai wujud nyata terselenggaranya pembangunan perekonomian masyarakat yang merata. Hal inilah yang mendasari pemerintah daerah melalui instansi terkait yakni Dinas Kelautan Dan Perikanan berupaya untuk mengembangkan UMKM khususnya disektor budidaya perikanan yang masih memiliki peluang untuk dapat terus dikembangkan. Menurut Kuncoro (2002) dikutip oleh Tejasari (2008: 22) mengatakan bahwa UMKM memiliki peranan sebagai pemain utama dalam

berbagai sektor perekonomian, penyedia lapangan pekerjaan terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan kajian teori tersebut maka tepat sekali jika pemerintah daerah berupaya untuk dapat mengembangkan sektor UMKM sebagai langkah pembangunan ekonomi yang merata.

Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagian besar merupakan usaha keluarga yang pengelolaannya masih dilakukan secara traditional serta umumnya mengalami berbagai macam hambatan. Jafar Hafisah (2004) mengatakan bahwa UMKM memiliki berbagai macam hambatan dalam pengembangannya yang utamanya datang dari internal usaha itu sendiri, diantaranya: terbatasnya kapasitas sumber daya manusia akibat kurangnya pengetahuan serta skill, terbatasnya modal usaha, dan lemahnya aspek pemasaran. Permasalahan atau hambatan tersebut juga dialami dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar. Menanggapi permasalahan tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan strategi pengembangan yang berpedoman pada rencana strategi dinas kelautan dan perikanan kabupaten banyuwangi tahun 2010-2015. Marrus (2002:31) mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi pengembangan UMKM budidaya perikanan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya: pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan modal usaha, serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).

a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan suatu jenis kegiatan usaha yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dan memiliki peranan penting dalam pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian kinerja dari UMKM masih dipandang sangat lemah, salah satunya disebabkan rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam pengembangan suatu usaha, sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting yang menentukan dapat berkembang atau tidaknya suatu usaha dengan baik. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur utama penunjang organisasi diartikan sebagai potensi maupun sumber daya non materiil bagi suatu organisasi yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah umumnya memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih terbilang rendah, berbanding terbalik dengan usaha skala besar yang memiliki tenaga kerja profesional. Terbatasnya kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh sektor UMKM kebanyakan karena masih rendahnya pengetahuan serta skill yang berhubungan langsung dengan bidang pekerjaan yang digeluti. Oleh karenanya, dalam pengembangan UMKM harus disertai dengan pengembangan sumber daya manusia yang mencakup berbagai aspek. Hal ini diperlukan mengingat masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM. Dalam rangka meningkatkan kapasitas yang dimiliki sumber daya manusia dalam UMKM budidaya perikanan, dinas kelautan dan perikanan melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui strategi

pemberdayaan berupa penguatan kelembagaan dalam bentuk kelompok usaha bersama, serta memberikan pembinaan dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Webster (dalam Sedarmayanti, 2003:59), yang menyatakan pemberdayaan memiliki dua arti, pertama mengandung arti memberi kekuasaan mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain, yang kedua memiliki arti sebagai upaya memberi kemampuan atau memberdayakan. Proses pemberdayaan lebih menekankan seseorang untuk memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang merupakan perhatiannya.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan lebih bersifat kolektif. Berdasarkan data dilapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan pada proses pemberdayaan sumber daya manusia UMKM budidaya perikanan berusaha mengarahkan pelaku usaha budidaya untuk membentuk suatu kelembagaan dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB). Menurut Parson dalam Suharto (2005:66) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu mikro, mezzo, dan makro. Pada kasus UMKM budidaya perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan pendekatan aras mezzo yang pada proses pemberdayaannya dilakukan pada sekelompok klien dan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan serta sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dengan adanya kelembagaan dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB), proses pemberdayaan sumber daya manusia dapat berjalan lebih efektif. Selain itu pemberdayaan melalui kelompok juga mampu menumbuhkan kemandirian terhadap pelaku usaha budidaya untuk dapat memecahkan masalah, yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan itu sendiri.

2. Pembinaan dan Pelatihan

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pemerintah memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah sebagai *government provision*. Pada hakekatnya *governmnt provision* merupakan salah satu bentuk peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pungutan kepada individu yang menikmatinya. Pada tahapan implementasi peranan pemerintah sebagai *government provision* dalam pengembangan UMKM, pertama pemerintah perlu melakukan kajian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan guna menunjang bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha. Kartasasmitta (1996:5) mengatakan bahwa dalam mengembangkan UMKM, Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Oleh karenanya penting sekali memberikan pembinaan dan pelatihan agar sumber daya manusia UMKM mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dengan menerapkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kedua, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan lagi penggunaan teknologi serta harus

mampu mengoptimalkan fungsi manajemen dan organisasi UMKM yang saat ini masih bersifat tradisional.

Pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terhadap UMKM budidaya perikanan telah dilakukan cukup bagus, karena mencakup berbagai macam aspek yang diperlukan dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan yaitu aspek manajemen usaha dan aspek teknik budidaya. Menurut Moekijat (dalam Wijayanti, 2002:32) pengembangan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan mempengaruhi sikap atau menambahkan kecakapan. Pada aspek manajemen usaha, pelaku usaha budidaya perikanan mampu menerapkan hasil pembinaan berupa pembukuan-pembukuan sederhana yang dapat membantu mengorganisir usaha yang dijalankannya sehingga pengembangan usaha yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Sementara pada aspek teknik, dilakukan pelatihan cara budidaya ikan baik (CBIB) serta penggunaan teknologi pendukung seperti kincir, pompa dan lainnya. Hasil dari pelatihan teknik terhadap UMKM budidaya perikanan mampu meningkatkan hasil produksi dengan mengurangi jumlah produksi yang gagal panen serta mampu meningkatkan kualitas produk yang juga berdampak pada nilai jual produk.

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan diprioritaskan pada usaha budidaya yang telah berjalan namun belum dikelola secara optimal serta usaha-usaha yang baru memulai. Dengan adanya pembinaan serta pelatihan-pelatihan yang diberikan pada UMKM budidaya perikanan mampu meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan baru bagi pelaku usaha yang dapat digunakan dalam

pengembangan usahanya sehingga pencapaian tujuan yang diharapkan lebih efektif dan efisien. Namun pencapaian tujuan dari diadakannya pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar belum dapat dikatakan tercapai secara optimal, karena masih ada sebagian pembudidaya yang belum merasakan dampak dari adanya pembinaan dan pelatihan tersebut. Dari data hasil temuan lapangan ditemukan bahwa setelah diadakannya pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan masih ada sebagian pembudidaya yang belum mengalami peningkatan signifikan terhadap pengembangan usahanya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya intensitas pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan, sehingga pengetahuan dan skill yang diberikan tidak dapat terserap secara optimal khususnya bagi kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang beranggotakan wirausahawan baru dan sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang budidaya perikanan. Menurut Sumodinigrat (dalam sulistiyani, 2004:82) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Berdasarkan kajian tersebut maka dari itu perlu adanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Banyuwangi hingga pelaku usaha budidaya perikanan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri dan nantinya juga akan memberikan dampak menyeluruh terhadap pengembangan UMKM di Kecamatan Muncar yang masih dapat terus dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemberian Bantuan Modal Usaha

Usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya merupakan usaha perseorangan yang sifatnya tertutup dengan sumber modal terbatas. Modal merupakan salah satu sumber daya penting selain sumber daya manusia yang digunakan dalam mengembangkan suatu usaha. Tanpa adanya modal yang mencukupi, sulit bagi suatu usaha untuk dapat berkembang dengan baik. Menurut Kartasmita (1996:5) dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah harus meliputi beberapa aspek diantaranya peningkatan terhadap akses asset produktif terutama modal, disamping teknologi, manajemen, dan segi lainnya. Modal merupakan sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang.

Dalam rangka penguatan sumber permodalan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha budidaya perikanan yang dapat digunakan untuk pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan peranan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu penyedia subsidi. Subsidi merupakan bentuk keterlibatan pemerintah secara tidak langsung yang pada dasarnya berupa bantuan permodalan secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan langsung yang diberikan dalam subsidi tidak hanya berupa modal produktif seperti uang namun juga dapat berbentuk peralatan penunjang usaha. Sementara bantuan tidak langsung dapat dilaksanakan dengan memberikan pelaku usaha kemudahan akses permodalan dari lembaga perbankan.

Bantuan permodalan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan saat ini hanya sebatas bantuan paket permodalan berupa peralatan atau pun sarana

penunjang produksi. Bantuan yang diberikan berupa peralatan penunjang produksi, bibit atau benih serta bantuan berupa pakan. Dengan adanya bantuan tersebut pemerintah mengharapkan proses produksi yang dilakukan oleh usaha, mikro, kecil, dan menengah dapat berjalan lebih lancar serta mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang didapat. Dalam pemberian paket bantuan permodalan, dibutuhkan peranan aktif partisipasi masyarakat melalui pengajuan proposal yang sebelumnya telah disusun secara bersama dalam kelompok. Bentuk partisipasi masyarakat ini sesuai dengan tata cara pengembangan UMKM yang telah dirumuskan kedalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, khususnya pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan gambar 4.7 tentang skema pengajuan proposal bantuan paket permodalan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi mengutamakan pemberian bantuan pada kelompok-kelompok pembudidaya yang belum pernah mendapatkan paket bantuan, sehingga pemberian paket bantuan permodalan dapat lebih merata. Selain pemberian paket bantuan permodalan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyediakan beberapa program-program unggulan dalam rangka mengembangkan UMKM di bidang budidaya perikanan yaitu program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak.

Program 10000 kolam merupakan program unggulan pemerintah daerah yang digagas oleh Bupati Anas dalam rangka meningkatkan produksi budidaya air tawar. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan

saat ini produksi budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Banyuwangi secara umum masih belum optimal dan masih dapat terus dikembangkan. Peningkatan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan potensial budidaya yang ada. Program 10000 kolam pekarangan dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa sarana pembentuk kolam seperti terpal dan sarana penunjang produksi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terjadi peningkatan hasil produksi usaha budidaya perikanan di kecamatan muncar setelah adanya program 10000 kolam pekarangan. Sebelum adanya program 10000 kolam pekarangan hasil rata-rata hasil produksi yang didapat oleh pembudidaya dari 2 buah kolam pembesaran yang dimiliki hanya mampu menghasilkan produksi sebesar 350-450 kg dalam satu kali siklus, setelah adanya bantuan kolam dari program 10000 kolam pekarangan hasil produksi yang didapat meningkat dua kali lipat kurang lebih mencapai 1000 kg atau 1 ton dalam satu kali siklus. Adanya program tersebut tentunya sangat membantu pelaku usaha budidaya air tawar di Kecamatan Muncar untuk dapat mengembangkan usahanya.

Program unggulan lain pemerintah daerah yaitu program revitalisasi tambak yang bertujuan untuk mengembangkan usaha budidaya perikanan air payau terutama di Kecamatan Muncar sebagai langkah terintegrasi guna percepatan pengembangan kawasan Minapolitan. Program revitalisasi tambak dilaksanakan melalui optimalisasi tambak-tambak idle atau terbengkalai agar mampu beroperasi kembali serta tambak-tambak traditional agar berkembang menjadi tambak traditional plus maupun semi intensif. Berdasarkan data sekunder yang didapat dari 610 ha rencana revitalisasi di 8 Kecamatan, 390 ha diantaranya terdapat di

Kecamatan Muncar. Kegiatan-kegiatan dalam Program revitalisasi tambak hanya berupa pembangunan fisik seperti perbaikan saluran irigasi, pembangunan reservoir dan juga perbaikan tanggul tambak akibat abrasi pantai, serta bantuan berupa teknologi pendukung seperti kincir dan pompa.

Adanya subsidi paket bantuan berupa sarana dan prasarana dan program-program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memang terbukti mampu meningkatkan hasil produksi yang didapat oleh pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar baik budidaya air tawar dan budidaya air payau yang tentunya peningkatan hasil produksi tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha budidaya itu sendiri. Namun, pemberian paket bantuan dan program-program pengembangan tersebut tidak dapat diberikan secara terus menerus sebagai modal utama dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan serta nantinya justru tidak dapat menumbuhkan kemandirian UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam pengembangan suatu usaha tetap membutuhkan modal produktif berupa finansial keuangan yang dapat diperoleh dari lembaga perbankan, namun saat ini permodalan tersebut masih sulit untuk dapat diakses khususnya oleh UMKM budidaya perikanan akibat adanya beberapa persyaratan administratif seperti harus tersedianya agunan. Cahyono (1983) dikutip oleh Tejasari (2008: 18) menyatakan bahwa modal dalam bentuk uang digunakan oleh sektor produksi untuk membeli modal dalam bentuk barang baru lagi. Oleh karena itu pemerintah hendaknya dapat memfasilitasi kemudahan akses UMKM budidaya perikanan

pada sumber-sumber permodalan produktif tersebut sehingga nantinya pelaku usaha budidaya perikanan dapat secara mandiri mengembangkan usahanya tanpa harus terus menerus bergantung pada pemerintah.

c. Pengembangan Balai Benih Ikan

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang budidaya perikanan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya memfasilitasi UMKM dalam berbagai aspek, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha budidaya perikanan. Upaya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan UMKM budidaya perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dirasa cukup walaupun belum optimal, dimana salah satu bentuk fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui pengembangan Balai Benih Ikan (BBI). Balai Benih Ikan memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal penyediaan bibit atau benih sebagai bahan baku utama usaha budidaya perikanan. Hal ini sesuai dengan peranan pemerintah/pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 16 ayat (1) point (a), yang menyebutkan pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan pengolahan dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Strategi pengembangan Balai Benih Ikan tentunya lebih dapat mengefektifkan proses pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

budidaya perikanan, yang mana pengembangan BBI dilakukan dengan meningkatkan mutu, kualitas dan kapasitas BBI agar dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dengan kualitas yang baik bagi usaha budidaya perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki dua Balai Benih Ikan yaitu BBI Genteng dan BBI Pakistaji, dalam pengembangannya produksi ke dua BBI tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 BBI genteng mampu menghasilkan produksi benih sebanyak 1.433.250 ekor meningkat sebesar $\pm 15\%$ dari produksi tahun 2010 yang mencapai 1.209.000 ekor, sementara untuk produksi BBI Pakistaji juga mengalami peningkatan sebesar $\pm 18\%$ dari produksi tahun 2010 sebesar 1.117.500 ekor meningkat pada tahun 2011 sebesar 1.365.000 ekor. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan harus terus melakukan pengembangan Balai Benih Ikan agar produksi benih-benih unggulan terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan UMKM budidaya perikanan yang jumlahnya dari tahun-ketahun terus bertambah.

2. Dampak Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan Bagi Masyarakat.

a. Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Pembudidaya

Pengembangan kawasan Minapolitan ditujukan untuk menyelenggarakan pembangunan utamanya di sektor ekonomi dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pada hakekatnya pengembangan kawasan Minapolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan

untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk UMKM di bidang budidaya perikanan. Namun, UMKM masih menemui berbagai macam hambatan dalam mengembangkannya usahanya, termasuk UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar yang merupakan wilayah pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi.

Hambatan yang umumnya dihadapi oleh UMKM budidaya perikanan diantaranya masih rendahnya tingkat produktifitas, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan manajemen usaha, serta masih lemahnya aspek permodalan yang dimiliki. Oleh karenanya dibutuhkan peranan khususnya dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan UMKM di bidang budidaya perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menerapkan beberapa strategi dalam rangka mengembangkan UMKM budidaya perikanan diantaranya melalui strategi pemberdayaan sumber daya manusia, pemberian bantuan permodalan, dan pengembangan balai benih ikan (BBI).

Adanya program-program pengembangan UMKM budidaya perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi seperti pembinaan dan pelatihan, pemberian bantuan paket modal usaha, serta pengembangan Balai Benih Ikan (BBI), disambut baik oleh pelaku usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar guna pengembangan usaha yang dijalankannya serta juga dapat menjadi upaya percepatan pengembangan Kawasan Minapolitan itu sendiri. Penerima program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya

perikanan di Kecamatan Muncar merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut, mengingat masih banyaknya jumlah masyarakat miskin dengan taraf hidup berada dibawah standar hidup layak.

Adanya program pengembangan UMKM tersebut pemerintah diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang mana masyarakat mampu secara mandiri di bidang perekonomian, seperti pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak yang mencakup pangan sandang papan masyarakat. Hal tersebut telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal pengembangan UMKM hanya sebagai inovator ataupun stimulant sehingga UMKM mampu bergerak sendiri secara mandiri dan kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Adanya strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya akan berdampak pada usaha budidaya perikanan yang ada di Kecamatan Muncar. Menurut Soemarwoto (dalam Purwati, 2012:147) adalah suatu perubahan baik sebagai aktivitas dan aktivitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini perubahan dapat bersifat negatif maupun positif. Pada kasus usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan dampak yang terjadi akibat diterapkannya strategi pengembangan adalah dampak positif, salah satunya adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi pembudidaya akibat meningkatnya produksi yang juga mempengaruhi peningkatan pendapatan pembudidaya. Dari hasil wawancara dengan bapak Nur Kholis selaku pelaku usaha budidaya perikanan air tawar mengaku bahwa setelah

adanya pelatihan dan pemberian bantuan seperti program 10000 kolam pekarangan, produksi usaha budidaya perikanan miliknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut beliau sebelum adanya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, produksi yang didapat dalam satu siklus dari satu kolam yang dimiliki hanya sebesar 80-100 kg dengan nilai pendapatan mencapai Rp. 250.000-450.000 per bulannya. Produksi tersebut meningkat hingga mencapai 1000-1300 kg dalam satu kali siklus dari empat buah kolam pembesaran yang dimiliki dengan nilai pendapatan mencapai Rp. 2.200.000-2.400.000 per bulannya.

Hasil wawancara lainnya dengan bapak Samsul selaku ketua POKDAKAN Raja Lele juga mengungkapkan hal yang senada, yang mana terjadi peningkatan pendapatan yang didapat dari usaha budidayanya setelah diadakannya program-program pengembangan oleh pemerintah. Bapak Samsul menyatakan bahwa saat ini pendapatan dari usaha budidayanya jika tidak kalah besarnya jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil eselon II. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Temuan lapangan tersebut juga didukung data sekunder tentang hasil produksi perikanan budidaya di Kecamatan Muncar pada tahun 2012-2013.

Pada tahun 2012 total produksi budidaya air tawar di Kecamatan Muncar sebesar 595.220 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 5.430.750.000. Dengan rincian produksi dari sektor perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Muncar

secara berturut-turut pada tribulan ke I sebesar 80.475 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 746.650.000, tribulan ke II 253.865 kg dengan nilai produksi Rp. 2.308.300.000, tribulan ke III 150.380 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 1.378.325.000, dan pada tribulan ke IV sebesar 110.500 kg dengan nilai Rp. 1.005.800.000. Selanjutnya pada tahun 2013 produksi budidaya air tawar secara berturut-turut tribulan I sebesar 80.505 kg dengan nilai Rp. 743.745.000, tribulan II 213.271 nilai Rp. 2.269.890.000, tribulan ke III 164.610 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 2.419.512.500 dan tribulan ke IV produksi mencapai 214.815 kg dengan nilai produksi Rp. 2.889.837.500. Total Produksi pada tahun 2013 mencapai 8.322.985.000 meningkat sebesar 11% dari tahun 2012. Kontribusi terbesar pada produksi budidaya air tawar masih didominasi komoditas budidaya lele. Sementara untuk produksi budidaya air payau saat ini masih didominasi komoditas udang vanamei.

pada tahun 2012 produksi budidaya air payau berturut-turut pada tribulan ke I sebesar 827.700 kg dengan nilai produksi Rp. 36.915.000.000, tribulan ke II mencapai 434.000 kg dengan nilai Rp. 19.335.500.000, tribulan ke III produksi sebesar 320.425 kg dengan nilai Rp. 14.213.625.000, dan tribulan ke IV produksi budidaya air payau sebesar 346.055 kg dengan nilai produksi mencapai Rp. 15.452.950.000. Selanjutnya, pada tahun 2013 produksi budidaya air payau pada tribulan ke I mencapai 827.435 kg dengan nilai 36.917.200.000, tribulan ke II 443.015 kg nilai Rp. 19.745.975.000, tribulan ke III produksi sebesar 444.610 kg dengan nilai Rp. 32.614.325.000, dan pada tribulan ke IV produksinya mencapai 346.055 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 25.282.750.000. Total produksi

budidaya air payau di Kecamatan Muncar mencapai 2.061.115 kg mengalami peningkatan sebesar 6,5% dari tahun 2012 yang total produksinya mencapai 1.928.180 kg. Namun untuk besarnya data produksi budidaya air payau tersebut masih di dominasi oleh kontribusi usaha-usaha skala besar sementara kontribusi usaha mikro, kecil pada produksi budidaya air payau masih terbilang minim.

Adanya peningkatan pendapatan tersebut telah sesuai dengan tujuan pengembangan UMKM itu sendiri. Menurut Pamudji (1985:7) pengembangan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai tinggi yang juga bermakna sebagai usaha-usaha pembaharuan dengan membuat sesuatu lebih cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik, dan bermanfaat. Berdasarkan kajian teori tersebut dampak dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sudah dirasa cukup baik karena mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang salah satu indikatornya dapat dilihat melalui meningkatnya pendapatan pembudidaya, hal tersebut tentunya bermanfaat dan mampu menjadikan perekonomian pembudidaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, dampak dari pengembangan UMKM tersebut juga telah sesuai dengan capaian rencana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu berupa outcome meningkatnya kesejahteraan petani/ pembudidaya ikan. Oleh karenanya program pengembangan tersebut hendaknya terus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program tersebut guna menciptakan kemandirian ekonominya.

b. Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pembudidaya, tetapi juga mampu mengangkat perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya. Banyaknya pembudidaya yang berhasil dalam mengembangkan usahanya yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya mampu menarik minat masyarakat untuk ikut terjun dalam bidang budidaya perikanan ini. Hal tersebut menimbulkan efek *domino* yang mana masyarakat secara tidak langsung juga dapat menyadari pentingnya strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut bagi perekonomiannya, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menahu mengenai program tersebut akhirnya mengerti dan mulai memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan perekonomiannya.

Menurut bapak Samsul Arifin selaku ketua POKDAKAN Raja Lele mengatakan bahwa jumlah wirausahawan di bidang budidaya perikanan terus meningkat tiap tahunnya. Beliau mengatakan bahwa pada awal mula memulai usahanya pada tahun 2004 masih sedikit masyarakat disekitar lingkungannya yang beralih mata pencaharian sebagai pembudidaya ikan. Namun lama kelamaan setelah banyaknya pembudidaya yang dinilai sukses utamanya setelah adanya program pengembangan UMKM budidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, mulai menarik minat masyarakat untuk beralih mata pencaharian sebagai pembudidaya ikan. Bapak Samsul menambahkan bahwa saat ini hampir semua warga yang ada di dusunnya beralih

mata pencaharian ke bidang budidaya perikanan yang sebelumnya kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan petani.

Pernyataan tersebut juga didukung data sekunder yang didapat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2013. Pada 2010 jumlah unit UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sebanyak 121 unit yang tergabung kedalam 17 kelompok usaha bersama (KUB), selanjutnya jumlah UMKM budidaya perikanan pada tahun 2011 sebanyak 131 unit usaha dalam 18 kelompok usaha bersama. Pada tahun 2012 jumlah tersebut meningkat menjadi 141 unit usaha yang tergabung dalam 19 kelompok usaha bersama, dan pada tahun 2013 jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 436 unit usaha yang tergabung kedalam 30 kelompok usaha bersama (KUB).

Selain mampu menumbuhkan wirausahawan baru di bidang budidaya perikanan, pengembangan UMKM budidaya perikanan juga mampu menyerap tenaga kerja walaupun saat ini jumlahnya tidak sebesar sektor industri. Untuk tenaga kerja yang terserap pada sektor ini bergantung pada banyaknya jumlah kolam yang dimiliki, hal ini tentunya juga berkontribusi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kecamatan Muncar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, rata-rata satu unit usaha budidaya dengan kolam sebanyak lima buah, mampu mempekerjakan 2-3 orang tenaga kerja dan hal ini dapat bertambah jika pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha, atau penganeekaragaman usaha.

Devesivikasi usaha yang dilakukan berupa pengolahan hasil produk budidaya perikanan, yang mana usaha olahan ini mampu juga memberdayakan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan usaha tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Samsul yang menyatakan dengan melakukan diversivikasi berupa pengolahan hasil budidaya mampu memberdayakan ibu-ibu yang ada disekitar usahanya. Untuk saat ini Bapak Samsul setidaknya telah memperkerjakan sekitar 13 orang untuk membantu pengolahan berupa krupuk lele dan abon lele.

Gie Kian (2003) menjelaskan bahwa pengembangan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistimatis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausahawan baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal. Berdasarkan kajian teori tersebut maka dampak dari adanya pengembangan UMKM budidaya perikanan di Kecamatan Muncar telah mampu menumbuhkan wirausahawan baru di bidang budidaya perikanan serta mampu menyerap tenaga kerja yang nantinya juga akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran di Kecamatan Muncar. Berdasarkan peran-peran itulah maka sangat penting sekali bagi pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat terus mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu bertahan bahkan tumbuh menjadi skala usaha yang lebih besar lagi sehingga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat jauh lebih luas lagi.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Minapolitan

a. Faktor Penghambat

Dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam prosesnya pengembangan UMKM budidaya perikanan ditemui berbagai macam kendala atau penghambat, baik yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan maupun oleh internal UMKM itu sendiri. Faktor penghambat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah diantaranya:

1. Minimnya jumlah personil serta kualifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

Terbatasnya jumlah serta kualifikasi petugas lapangan yang ada, menjadikan proses pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UMKM menjadi tidak optimal. Bapak Suryono Bintang, SP selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya mengatakan bahwa jumlah tenaga lapangan guna teknis pengembangan usaha mikro, kecil, menengah masih sangat minim, saat ini jumlah staf di bidang budidaya perikanan hanya sebanyak 6 orang dan ditambah dengan beberapa tenaga penyuluh kontrak. Namun, jumlah staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi serta tenaga penyuluh kontrak yang ada masih tetap tidak mampu untuk mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UMKM budidaya perikanan yang tidak hanya dilakukan di Kecamatan Muncar tetapi mencakup

seluruh Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 24 Kecamatan. Menurut Milen (2006:14) pengembangan kapasitas diartikan secara sempit sebagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan secara umum. Berdasarkan pendapat tersebut maka pengembangan kapasitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan UMKM. Dengan adanya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan maka akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki UMKM sehingga nantinya dapat diterapkan guna pengembangan usahanya. Dengan minimnya jumlah tenaga lapang guna pembinaan dan pelatihan maka berpengaruh pada minimnya jumlah sumber daya manusia pada UMKM yang dapat dibina dan dilatih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Minimnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan nantinya juga berdampak pada pengelolaan usaha yang dijalankan seperti tidak diterapkannya manajemen usaha bahkan yang sederhana sekalipun serta tidak diterapkannya teknik-teknik budidaya yang baik sehingga mempengaruhi kualitas dan jumlah produksi yang didapat. Hal tersebut tentunya mengakibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sulit untuk berkembang bahkan sulit untuk mampu bertahan dalam persaingan ketat dalam dunia usaha saat ini.

2. Masih lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait

Faktor penghambat lainnya yang dihadapi diantaranya masih rendahnya koordinasi dan sinergi antar kelembagaan atau kelompok usaha bersama (KUB) budidaya perikanan. Pembentukan kelompok utamanya ditujukan sebagai wadah pembelajaran bagi pembudidaya untuk dapat saling bertukar pengalaman guna

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Namun, hal tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, dalam beberapa kasus yang ditemui dilapangan terdapat suatu kondisi yang mana kelompok mengalami situasi stagnan atau kebuntuan dalam mengembangkan usaha anggotanya yang utamanya terjadi pada kelompok yang beranggotakan wirausahawan baru dan minim akan pengalaman di bidang budidaya perikanan. Hambatan tersebut diperparah dengan tidak adanya koordinasi dan sinergi antar KUB yang di Kecamatan Muncar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul ditemukan fakta bahwa masih belum adanya komunikasi antar KUB budidaya perikanan di Kecamatan Muncar dalam rangka pengembangan usaha budidaya perikanan. Koordinasi dan sinergi antar kelompok budidaya diperlukan agar kelompok-kelompok budidaya perikanan di kecamatan muncar dapat saling membantu jika menemui suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui dalam diskusi internal kelompok.

3. Terbatasnya akses UMKM kepada sumber permodalan produktif

Sementara itu faktor penghambat lainnya yang *crucial* dalam pengembangan UMKM yaitu sulitnya akses terhadap sumber permodalan produktif. Modal merupakan salah satu sumber penting dalam pengembangan suatu usaha. Dalam kasus pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar, ada sebagian pembudidaya yang masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan guna pengembangan usahanya akibat adanya persyaratan administratif serta agunan yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku usaha. Adanya bantuan modal usaha dari Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berupa sarana dan prasarana penunjang produksi masih dinilai belum optimal oleh pembudidaya dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan jika tidak ditunjang dengan adanya permodalan berupa *financial* keuangan. Modal tersebut dapat dimanfaatkan UMKM sebagai modal kerja maupun modal investasi.

Bank Indonesia (1999) dikutip oleh Tejasari (2008: 18) menjelaskan bahwa kredit modal kerja digunakan untuk menambah modal kerja untuk pembiayaan dalam jangka pendek sementara kredit investasi digunakan untuk pembelian barang-barang modal untuk keperluan jangka panjang. Berdasarkan kajian keilmuan tersebut maka kredit modal kerja dan investasi sangat penting sekali bagi pengembangan UMKM dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut para pembudidaya berinisiatif untuk melakukan pinjaman diluar perbankan dengan bunga yang cukup membebani pembudidaya, sehingga mengurangi jumlah pendapatan yang didapat dari usahanya.

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan UMKM budidaya perikanan

Faktor lainnya yang menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan yakni terbatasnya sarana dan prasarana seperti masih minimnya jumlah produksi balai benih ikan (BBI). Balai benih ikan merupakan ujung tombak dalam progam pengembangan perikanan budidaya yang memiliki peranan dalam penyedia bahan baku utama dalam usaha budidaya perikanan. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi memiliki dua balai benih ikan yaitu BBI Pakistaji dan BBI Genteng, namun saat ini produksi kedua

BBI tersebut masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan yang tidak hanya berada di Kecamatan Muncar namun yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Mininnya produksi balai Balai Benih Ikan (BBI) berdampak pada kemampuan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi ketersediaan bahan baku berupa bibit atau benih unggul bagi pelaku usaha budidaya. Tidak tersedia benih-benih unggul bagi pelaku usaha budidaya perikanan tentunya berdampak pada kualitas hasil produksi UMKM budidaya perikanan yang berdampak pada nilai jual produk. Oleh karenanya, saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya untuk mengembangkan balai benih ikan guna meningkatkan produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan bahan baku bagi UMKM budidaya perikanan yang jumlahnya terus meningkat.

Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan UMKM tersebut dapat menjadi sebuah tolak ukur atau bahan evaluasi strategi yang ada, khususnya bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan Siagian (2002:102-103) yang mengatakan bahwa strategi yang dirumuskan harus menuju disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan muncul dan dilain pihak mampu memperkecil dampak dari berbagai faktor yang sifatnya negative dan bahkan merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan organisasi. Dengan adanya evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap strategi

pengembangan UMKM yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga pencapaian tujuan pengembangan tersebut lebih efektif dan efisien.

b. Faktor Pendukung

1. Masih besarnya potensi lahan untuk pengembangan usaha budidaya perikanan

Faktor yang mendukung dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan di Kecamatan Muncar diantaranya masih adanya lahan potensial yang dapat dikembangkan untuk usaha budidaya. Usaha budidaya merupakan salah satu sektor usaha yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada. Di Kecamatan Muncar usaha mikro, kecil, dan menengah masih dapat terus dikembangkan mengingat masih banyaknya lahan potensial yang dapat digunakan sebagai usaha budidaya, untuk budidaya air payau masih terdapat garis pantai sepanjang 13 km sementara untuk budidaya air tawar masih banyak lahan tak terbangun seperti sawah, kebun, ladang, bahkan pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan guna pengembangan usaha budidaya air tawar.

2. Adanya dukungan dari pemerintah

Berdasarkan masih besarnya potensi lahan guna pengembangan UMKM budidaya perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya memberikan dukungan agar pemanfaatan potensi tersebut lebih optimal melalui program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak. Dengan adanya dukungan pemerintah tersebut masyarakat dapat lebih memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemandirian di bidang ekonomi. Nugroho dan Dahuri

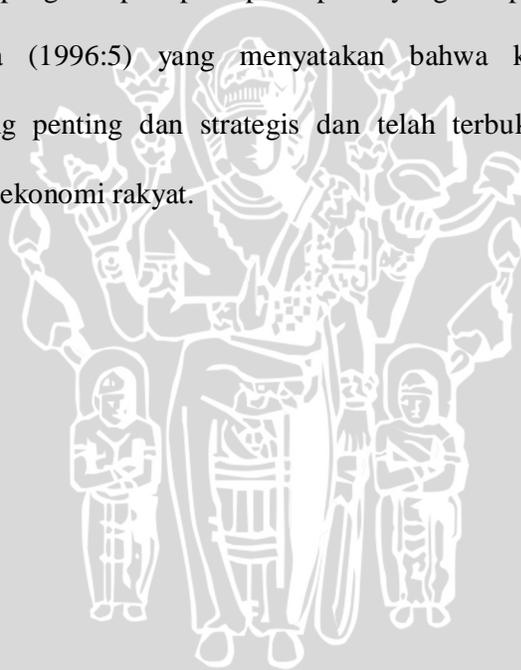
(2012:286) mengatakan bahwa penggerak utama Minapolitan di bidang budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, telah sesuai dengan salah satu tujuan pengembangan kawasan Minapolitan utamanya melalui sektor budidaya perikanan.

3. Adanya peluang untuk diversifikasi usaha.

Selain itu ada pula faktor pendukung yang datang dari internal UMKM yakni adanya peluang untuk melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha merupakan kegiatan dalam rangka penganekaragaman produk, diversifikasi dalam UMKM budidaya perikanan dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan berupa sosis, nugget, krupuk, maupun ikan kaleng atau sarden. Hal ini sesuai dengan kajian teori tentang prinsip pengembangan kawasan Minapolitan, yaitu Prinsip percepatan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan melalui inovasi dan kebijakan terobosan untuk peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat dunia (Nugroho dan Dahuri, 2012:286). Dengan dilakukannya pengolahan tersebut maka produk yang dihasilkan memiliki daya tahan lebih lama sehingga produk dapat dipasarkan secara luas tidak terbatas ruang, selain itu adanya diversifikasi juga mampu meningkatkan nilai jual produk yang juga berpengaruh pada kesejahteraan pembudidaya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, maka penting sekali bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi untuk memanfaatkan fakto-faktor pendukung tersebut guna perbaikan-perbaikan strategi pengembangan UMKM berbasis Minapolitan kedepannya.

4. Adanya kemitraan dengan pihak swasta

Faktor-faktor pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya yaitu adanya kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan produksi berupa pakan murah. Kemitraan antara UMKM dengan swasta difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Adanya bentuk kemitraan tersebut, tentunya sangat membantu UMKM dalam mendapatkan pakan dengan harga yang murah sehingga biaya produksi yang dikeluarkan lebih dapat ditekan serta akan berpengaruh pula pada pendapatan yang didapat. Hal ini sesuai dengan Kartasmita (1996:5) yang menyatakan bahwa kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dari bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan beberapa point penting, mengenai strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Minapolitan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengembangkan UMKM Dinas Kelautan dan Perikanan menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah Pemberdayaan Sumber daya manusia melalui pemberian pembinaan dan pelatihan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DKP terhadap SDM dalam UMKM dilakukan secara kolektif. Dengan adanya kelembagaan dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB), proses pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif. Setelah terbentuknya kelompok maka selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan mulai memberikan pelatihan dan pembinaan. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan cukup baik karena telah mencakup aspek manajemen usaha dan teknik budidaya yang nantinya dapat diterapkan dalam pengembangan usahanya. Hasil dari pelatihan teknik terhadap UMKM budidaya perikanan mampu meningkatkan hasil produksi dengan mengurangi jumlah produksi yang gagal panen, serta meningkatkan kualitas produksi yang juga mempengaruhi nilai jual produk. Namun pencapaian tujuan dari diadakannya pembinaan dan pelatihan tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih rendahnya intensitas pembinaan dan pelatihan yang diberikan. Oleh karenanya

diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan mampu megakomodir kebutuhan pelaku usaha mengenai pemberian pembinaan dan pelatihan hingga pelaku UMKM benar-benar mampu mandiri.

2. Sebagai usaha perseorangan, UMKM budidaya perikanan memiliki sumber permodalan yang terbatas. Dalam rangka penguatan sumber permodalan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan bantuan permodalan berupa peralatan atau pun sarana penunjang produksi seperti bantuan bibit atau benih dan pakan serta adanya program-program unggulan seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terjadi peningkatan hasil produksi setelah adanya bantuan permodalan tersebut,. Adanya bantuan permodalan ini memanag terbukti mampu meningkatkan produksi budidaya perikanan yang nantinya juga mempengaruhi pendapatan pembudidaya, namun bantuan tersebut tidak dapat diberikan terus menerus karena nantinya justru tidak akan dapat menumbuhkan kemandirian. Dalam pengembangan suatu usaha tetap membutuhkan permodalan produktif berupa uang yang dapat digunakan sebagai modal kerja maupun investasi. Sumber permodalan tersebut dapat diakses oleh pembudidaya pada lembaga perbankan, yang saat ini masih sulit diakses akibat tidak dapat dipenuhinya beberapa persyaratan terutama adanay agunan. Oleh karenanya sebaiknya pemerintah dapat memfasilitasi pembudidaya untuk dapat mengakses sumber permodalan tersebut agar pembudidaya tidak terus menerus bergantung pada pemerintah dalam mengembangkan usahanya.

3. Balai Benih Ikan memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pengembangan usaha budidaya perikanan dalam hal penyediaan bibit atau benih sebagai bahan baku utama usaha budidaya perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki dua Balai Benih Ikan yaitu BBI Genteng dan BBI Pakistaji, dalam pengembangannya produksi ke dua BBI tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 total produksi benih ke dua BBI mencapai 2.798.250 ekor meningkat sebanyak 16 % dari tahun 2010 yang hanya sebesar 2326500 . Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan harus terus melakukan pengembangan Balai Benih Ikan agar produksi benih-benih unggulan terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan UMKM budidaya perikanan yang jumlahnya dari tahun-ketahun terus bertambah.
4. Adanya program pengembangan UMKM di Kecamatan Muncar sebagai upaya percepatan pengembangan Kawasan Minapolitan, mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan khususnya perekonomian pelaku usaha budidaya serta perekonomian masyarakat secara umum. Dampak dari adanya pengembangan tersebut, yang terlihat jelas yaitu terjadinya peningkatan pendapatan pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang didapat setelah adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Sebelum dilakukannya program pengembangan tersebut pendapatan dari usaha budidaya perikanan masih terbilang minim bahkan cenderung mengalami kerugian. Maka dengan adanya program pengembangan tersebut, para pelaku usaha budidaya merasa sangat

terbantu untuk dapat menciptakan kondisi dimana mereka mampu keluar dari struktur kemiskinan yang ada dan mampu secara mandiri di bidang perekonomian, seperti pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak yang mencakup papan, sandang, pangan.

5. Dampak positif lainnya dari pengembangan UMKM tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha budidaya namun manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat disekitar usaha budidaya itu sendiri. Banyaknya usaha budidaya yang sukses mengembangkan usahanya mampu menarik minat masyarakat untuk mulai berwirausaha dibidang budidaya dengan maksud memperbaiki kesejahteraan ekonominya.
6. Usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Minapolitan dalam pengembangannya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik yang menghambat maupun faktor pendukung. Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM diantaranya terbatasnya jumlah serta kualifikasi tenaga lapang dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan yang dibutuhkan guna pengembangan kapasitas sumber daya manusia UMKM, masih minimnya sarana dan prasarana dalam hal ini Balai Benih Ikan (BBI) yang produksinya masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan bibit atau benih unggul sebagai bahan baku utama usaha budidaya, masih rendahnya koordinasi dan sinergi antar kelompok pembudidaya. Faktor penghambat lainnya yaitu sulitnya akses UMKM pada sumber permodalan produktif akibat besarnya jumlah jaminan atau agunan yang ditetapkan lembaga perbankan dan belum adanya lembaga-

lembaga lainnya yang mampu menyediakan kebutuhan permodalan tersebut, seperti: Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

7. Selain faktor penghambat juga terdapat faktor-faktor yang mendukung dalam pengembangan UMKM berbasis Minapolitan. Adapun faktor-faktor pendukung pengembangan UMKM diantaranya masih banyaknya lahan potensial di Kecamatan Muncar yang dapat dikembangkan sebagai sentra produksi budidaya perikanan, baik sektor budidaya air payau maupun budidaya air tawar. Untuk budidaya air payau pengembangannya masih dapat terus dilakukan mengingat Kecamatan Muncar memiliki garis pantai sepanjang ± 13 km. Sementara untuk budidaya air tawar peluang pengembangannya jauh lebih besar, melihat usaha budidaya air tawar tidak membutuhkan lahan seluas usaha budidaya air payau dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti daerah persawahan, kebun, ladang, bahkan halaman pekarangan. Selain itu adanya dukungan pemerintah berupa pemberian paket permodalan berupa sarana dan prasarana, peralatan penunjang produksi serta program unggulan dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan seperti program 10000 kolam pekarangan dan program revitalisasi tambak. Adanya kemitraan antara UMKM dengan pihak swasta dalam hal penyediaan pakan guna produksi merupakan salah satu faktor pendukung lainnya. Dengan adanya kemitraan tersebut mampu menekan biaya produksi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan. Faktanya lainnya yaitu masih besarnya peluang untuk melakukan diversifikasi usaha berupa produk olahan hasil perikanan seperti abao, sosis, nugget, dan sarden yang mampu meningkatkan nilai jual produk.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah maka diajukan beberapa point sebagai saran dalam rangka perbaikan strategi pengembangan selanjutnya, diantaranya:

1. Untuk mengatasi faktor penghambat pada point ke 1 dan ke 2 mengenai minimnya tenaga lapang dan belum adanya sinergi dan koordinasi antar kelompok usaha bersama (KUB), Pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) di Kecamatan Muncar sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, mengingat terbatasnya jumlah dan kualifikasi tenaga atau petugas lapangan yang dimiliki dalam pengembangan UMKM. Susunan pengurus UPP sebaiknya berasal dari pelaku usaha budidaya dan anggotanya terdiri dari KUB-KUB budidaya perikanan yang ada di Kecamatan Muncar, sehingga UPP juga berfungsi sebagai kelembagaan KUB yang ada di Kecamatan Muncar. Selain itu, UPP sebaiknya juga bekerja sama dengan pihak swasta yang profesional dalam rangka memberikan pembinaan dan pelatihan agar hasil yang didapat lebih dalam pengembangan UMKM lebih optimal.
2. Menyikapi persoalan mengenai masih sulitnya akses pembudidaya dalam memperoleh sumber permodalan produktif, pemerintah daerah sebaiknya membentuk lembaga lain selain perbankan yang mampu menyediakan sumber permodalan produktif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya

perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dapat berkerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk koperasi atau KUD khusus pembudidya ikan di Kecamatan Muncar, mengingat pentingnya UMKM dalam mendukung percepatan pengembangan kawasan Minapolitan. Koperasi diharapkan mampu menyediakan kredit permodalan dengan bunga yang tidak begitu membebani pelaku usaha budidaya mengingat panen usaha budidaya setiap tiga bulan sekali. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat dapat berperan dalam menjamin kredit UMKM di lembaga perbankan dengan member subsidi bunga kredit atas pinjaman pada pihak perbankan.

3. Mengantisipasi faktor penghambat ke tiga mengenai terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan UMKM budidaya perikanan seperti masih terbatasnya produksi benih BBI dalam memenuhi kebutuhan benih unggul, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan kerja sama dengan unit-unit usaha swasta dalam pemenuhan kebutuhan benih unggul bagi usaha budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan khususnya di Kecamatan Muncar. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih mengoptimalkan peranan Unit-unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sehingga nantinya juga akan lebih banyak memberdayakan masyarakat.
4. Pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah budidaya perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi perlu mencakup aspek-aspek lain yang lebih luas dan tidak hanya sebatas aspek

manajemen usaha dan teknik budidaya. melihat adanya peluang untuk melakukan diversifikasi usaha melalui pengelolaan hasil produk perikanan, maka sebaiknya pembinaan dan pelatihan yang diberikan juga mencakup cara atau teknik-teknik pengolahan hasil perikanan yang baik. Oleh karenanya dalam pengembangan UMKM budidaya perikanan diharapkan Bidang Perikanan Budidaya mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dalam hal pemberian pembinaan dan pelatihan bagi sumber daya manusia UMKM. Adanya pelatihan pengolahan hasil perikanan bagi UMKM budidaya perikanan tentunya mampu meningkatkan nilai jual produk bahkan nantinya diharapkan produk olahan hasil perikanan UMKM berbasis Minapolitan mampu menembus pasar-pasar dunia, semisal produk olahan lele yang dapat diekspor ke negara-negara seperti Thailand dan Vietnam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2012. *Kecamatan Muncar Dalam Angka 2012*. Banyuwangi
- B N, Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2012. *Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi.
- Gie Kian, K. 2003. *Perekonomian Indonesia Tahun 2004, Prospek dan Kebijakan*. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2004, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah", *Infokop*, No. 25, Tahun XX.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembelajaran Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: BAPPENAS.
- Liana, Lie. 2008. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana memperkokoh struktur perekonomian nasional. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 15 (2). 98 106
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 1 (1)
- Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho dan Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta:LP3ES anggota Ikapi.
- Pamudji. S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pamungkas, Wingking. 2013. *Implikasi Ekonomi Dan sosial Masyarakat Pesisir Atas Tangkapan Lemuru (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang:UB
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Statejik*. Jakarta: Bumi Aksara

Sjaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi Badan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wijayanti, Tuti. 2002. *Rencana Strategis Kantor Pariwisata Kab. Klaten dalam Pengembangan Obyek Wisata Makam Sunan Pandanaran.. FISIP UNS*

Tejasari, Maharani. *Peranan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Minapolitan.

Sumber Internet:

Desk Informasi. 2011. "Pengembangan Muncar Sebagai Kota Ikan". Diakses 17 Desember 2013, dari (<http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-1910-pengembangan-muncar-sebagai-kota-ikan.html>)

DAFTAR LAMPIRAN**PANDUAN WAWANCARA UNTUK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI**

1. Apakah saat ini pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah budidaya perikanan di Kecamatan Muncar sudah berjalan secara optimal ?
2. Bagaimanakah prospek pengembangan usaha budidaya perikanan di Kecamatan Muncar khususnya dalam menunjang program pengembangan kawasan Minapolitan ?
3. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan UMKM berbasis Minapolitan ?
4. Bagaimanakah peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembentukan kelompok usaha bersama KUB? serta tujuan pembentukan KUB ?
5. Apa saja bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada UMKM ?
6. Bagaimanakah implementasi program bantuan permodalan usaha dalam mengembangkan UMKM budidaya perikanan ? Siapa saja sasaran dalam program tersebut ?
7. Bagaimanakah peran Balai Benih Ikan (BBI) dalam pengembangan UMKM di bidang budidaya perikanan ?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan UMKM ?

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK PELAKU USAHA BUDIDAYA
PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR**

1. Bagaimanakah awal terbentuknya kelompok usaha bersama (KUB) ? pada tahun berapa kelompok terbentuk ?
2. Berapakah jumlah awal anggota kelompok saat pertama terbentuk ? dalam perkembangannya, saat ini ada berapa jumlah anggota?
3. Apasajakah kegiatan rutin yang dilakukan dalam kelompok usaha bersama (KUB) ?
4. Apa yang menjadi alasan anda untuk bergabung ke dalam kelompok usaha bersama ini?
5. Apa saja manfaat yang didapat dalam mengembangkan usaha milik anda setelah bergabung dengan KUB ?
6. Apa saja hambatan yang sering anda temui dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan ini ?
7. Apa saja bentuk bantuan dan pembinaan atau pelatihan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang pernah diterima ?
8. Apakah ada peningkatan dalam usaha anda setelah dilakukannya program pengembangan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ?
9. Berapakah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha budidaya ini ?



Pembinaan Manajemen Usaha dan Pelatihan Teknik Budidaya



Program Revitalisasi Tambak



Program 10000 kolam pekarangan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418 Fax (0333) 421418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : disperikanan@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor: 523/619/429.113/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : AKBAR KHAMARULLAH
NIM : 105030100111038
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat : Jl. Banterang Baru No.27, Kelurahan Kampung Melayu,
Banyuwangi

Bahwa nama tersebut adalah benar-benar telah melakukan penelitian untuk keperluan skripsi yang berjudul "STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS MINAPOLITAN (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)" mulai tanggal 6 Februari 2014 s/d 15 Maret 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 April 2014.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyuwangi.



Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP
Bina Tingkat I
Np. 19631213 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
 B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 06 Pebruari 2014

Nomor : 072/ 124 /REKOM/429.204/2014
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi IJn Penelitian

Kepada :
 Yth : 1. Kepala Bappeda
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 3. Camat Muncar
 di -

B A N Y U W A N G I

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
 Malang
 Tanggal : 30 Januari 2014
 Nomor : 1223/UN.3/PG/2014
 Bersama ini diberitahukan
 N a m a / N I M : **AKBAR KHAMARULLAH / 105030100111038**

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Strategi Pengembangan UMKK Berbasis Minapolitan (Studi
 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)
 Tempat : Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Muncar
 Waktu : 06 Pebruari 2014 s.d. 15 Maret 2014

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan kepada peserta:

1. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Instansi setempat.
2. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Keasatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan
 Kebangsaan



Tembusan :

Kepada Yth.
 Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang

CURRICULUM VITAE

Data pribadi

1. Nama : Akbar Khamarullah
2. Tempat, tanggal Lahir : Sumenep, 23 Februari 1991
3. Nomor Induk Mahasiswa : 105030100111038
4. E-mail : akhamarullah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Kepatihan 3 Banyuwangi Tamat tahun 2003
2. SMPN 1 Giri Banyuwangi Tamat tahun 2006
3. SMAN 1 Giri Banyuwangi Tamat tahun 2010
4. 2010-2014, terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Pengalaman Kerja

1. Karyawan Realnet Jl. Semanggi Barat No. 36 Malang.

